



**Pemerintah Provinsi Sumatera Barat**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Jenderal Sudirman No. 52, Kota Padang



**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)**  
**TAHUN 2021 - 2026**

**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) SKPD Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 ini disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026. Renstra disusun melalui berbagai tahapan termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan (Stakeholders) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dan kabupaten/kota se Sumatera Barat.

Renstra ini merupakan dasar dan pedoman bagi eselon II, III, IV, UPTD dan Cabang Dinas di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat serta acuan bagi SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

Renstra ini perlu dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat serta para pemangku kepentingan pendidikan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program pembangunan bidang pendidikan secara sinergis dan berkesinambungan.

Padang, 9 September 2021  
Kepala Dinas Pendidikan  
Provinsi Sumatera Barat,



**Adib Alfikri, SE, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19730413 199703 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	7
1.3 Maksud dan Tujuan .....	9
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT .....</b>	<b>16</b>
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.....	16
2.2 Sumber Daya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.....	24
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat .....	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.....	30
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PENDIDIKAN SUMATERA BARAT .....</b>	<b>34</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan.....	34
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih.....	35
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	36
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	47
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	49
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>74</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.....	74
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>79</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>84</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN .....</b>	<b>91</b>
<b>BAB VIII PENUTUP.....</b>	<b>95</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tema pembangunan Indonesia khususnya di bidang pembangunan pendidikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN 2020-2024) adalah memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada sumberdaya alam (SDA) yang tersedia, sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Tema pembangunan pendidikan selama rencana pembangunan jangka panjang 2005-2024 terdiri dari empat tema yakni periode 2005-2009 adalah peningkatan kapasitas dan modernisasi pendidikan. Periode 2010-2014 temanya adalah penguatan pelayanan pendidikan, sedangkan tema pembangunan pendidikan saat ini yakni periode 2015-2019 adalah menyiapkan manusia Indonesia untuk memiliki daya saing regional dan tema pembangunan pendidikan pada periode 2020-2024 adalah peningkatan daya saing internasional. (lihat Renstra Dikbud RI 2020-2024).

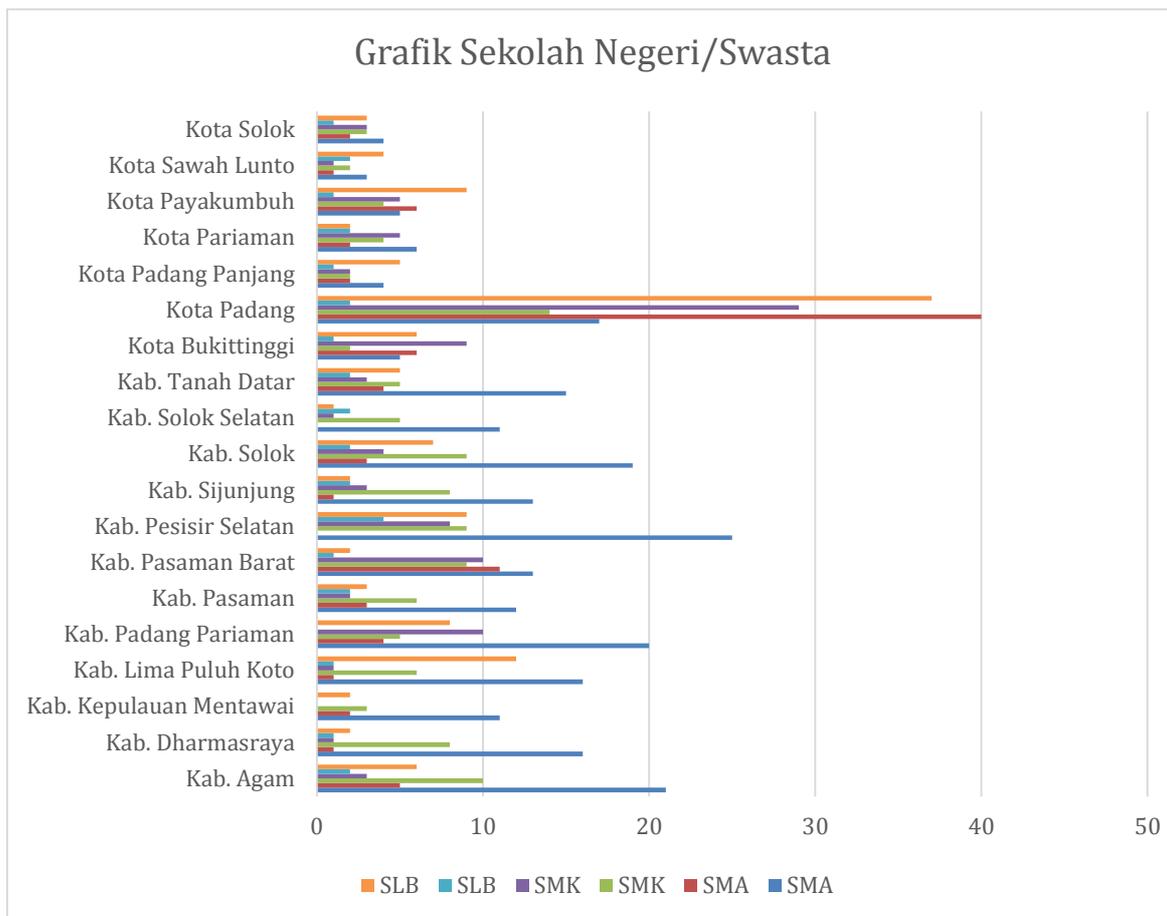
Pelaksanaan rencana strategis pembangunan pendidikan ini diarahkan oleh cara pandang (paradigma) agar sasaran yang dirumuskan dapat dicapai. Diantara paradigma pembangunan pendidikan nasional itu adalah: pendidikan untuk semua, pendidikan sepanjang hayat, pendidikan sebagai suatu gerakan, pendidikan menghasilkan pembelajar, pendidikan membentuk karakter, sekolah yang menyenangkan, pendidikan membangun kebudayaan.

Pendidikan untuk semua dimana pendidikan harus dapat diakses oleh setiap orang dengan tidak dibatasi oleh usia, tempat, dan waktu. Pemerintah harus menjamin keberpihakan kepada peserta didik yang memiliki hambatan fisik, mental, ekonomi, sosial, ataupun geografis. Sedangkan pendidikan sepanjang hayat adalah pendidikan harus

diselenggarakan dengan sistem terbuka yang memungkinkan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program secara lintas satuan dan jalur pendidikan. Sedangkan pendidikan sebagai suatu gerakan adalah penyelenggaraan pendidikan harus disikapi sebagai suatu gerakan, yang mengintegrasikan semua potensi negeri dan peran aktif seluruh masyarakat. Pendidikan menghasilkan pembelajar adalah Pendidikan diupayakan menghasilkan insan yang suka belajar dan memiliki kemampuan belajar yang tinggi. Pembelajar hendaknya mampu menyesuaikan diri dan merespons tantangan baru dengan baik.

Berikutnya pendidikan membentuk karakter adalah pendidikan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan kepribadian. Kepribadian dengan karakter unggul antara lain, bercirikan kejujuran, berakhlak mulia, mandiri, serta cakap dalam menjalani hidup. Selanjutnya sekolah yang menyenangkan adalah sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan bagi manusia yang berinteraksi di dalamnya, baik siswa, guru, tenaga pendidik, maupun orang tua siswa. Semua paradigma pembangunan pendidikan ini tentunya harus menjadi koridor dalam pembangunan pendidikan ke depannya.

Kemampuan pemerintah provinsi Sumatera Barat dalam mengembangkan aksesibilitas pendidikan menengah atas tentunya tidak terlepas dari potensi jumlah sekolah yang dimiliki baik sekolah menengah atas negeri maupun swasta. Jumlah sekolah menengah atas total adalah sebanyak 540 sekolah yang terdiri dari 330 (61,11%) SMA dan sebanyak 210 (38,88%) SMK. Dari jumlah SMA itu ternyata sebanyak 236 (70,44%) adalah SMA Negeri dan sebanyak 94 (28,48%) adalah SMA swasta dan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kelembagaan pendidikan SMA itu didominasi oleh SMA negeri dan begitu juga SMK negeri, peran sekolah swasta pada jenis SMA ini masih relative kecil. Untuk lebih detilnya lihat gambar grafik di bawah ini:

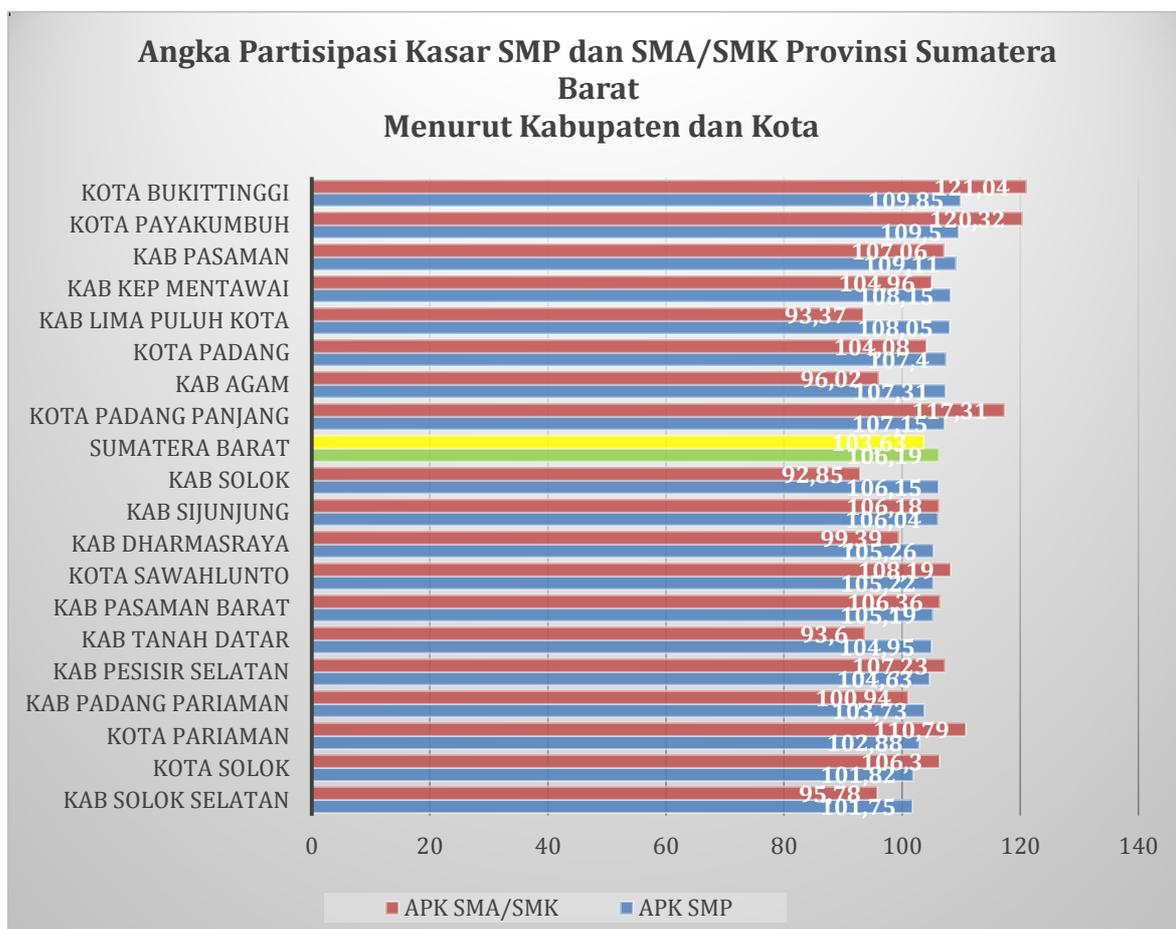


Gambar 1.1.1. Jumlah Sekolah SMA dan SMK Menurut Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2021

Jumlah lembaga pendidikan SMK adalah sebanyak 210 unit yang terdiri dari 110 (52,38%) SMK negeri dan sebanyak 100 (47,62%) adalah SMK Swasta, data ini menunjukkan potensi sekolah menengah kejuruan ini cukup berimbang potensinya di provinsi Sumatera Barat. Apabila dilihat dari segi lokasi, maka letak sekolah yang paling banyak itu terdapat di Kota Padang sebanyak 95 (17,92%), disusul oleh kabupaten Padang Pariaman dan Pasaman Barat yang jumlahnya sama yakni sebanyak 41(7,74%). Sedangkan wilayah kabupaten dan kota yang paling sedikit memiliki jumlah sekolah adalah Kota Sawahlunto, Kota Solok dan Kota Padang Panjang.

Apabila dikaitkan dengan angka partisipasi kasar (APK) SMA dan SMK ini, maka dua wilayah Kota yakni Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang ternyata memiliki angka APK berada di bawah rata-rata Sumatera Barat masing-masing secara berturut turut adalah 79.77 dan

76.97 jauh berada di bawah rata-rata APK SMA/SMK provinsi Sumatera Barat yang mencapai 80.46 untuk lebih detilnya lihat gambar di bawah:

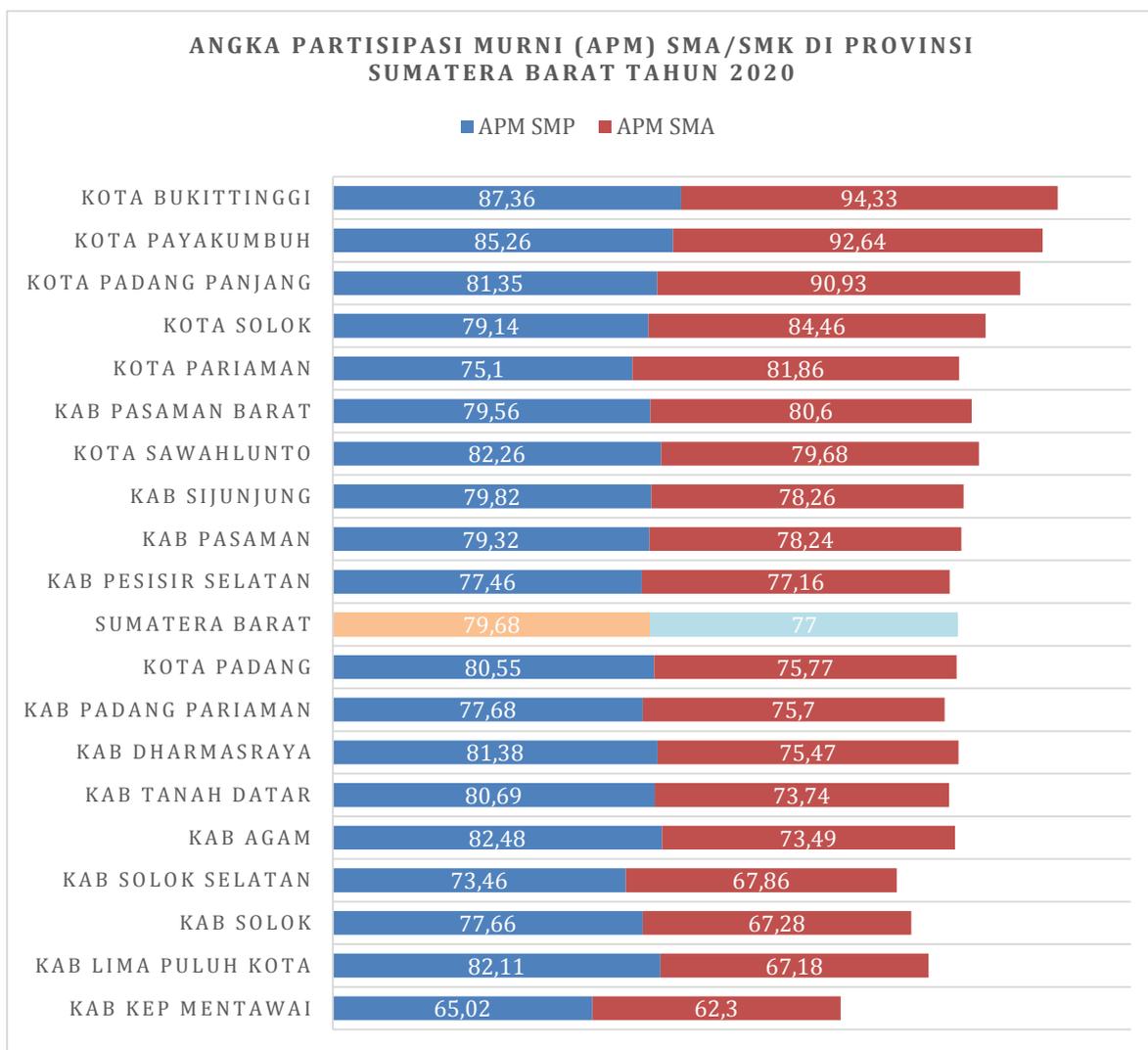


Gambar 1.1.2. Angka Partisipasi Kasar SMP dan SMA/SMK Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten dan Kota

Gambar 1.1.2. di atas juga memperlihatkan bahwa angka APK SMA/SMK yang tertinggi itu diraih oleh Kota Bukittinggi yang mencapai 121.04 dan Kota Solok yang mencapai 106.3. sehingga terdapat empat wilayah Kota yang telah memiliki angka APK yang berada di atas rata-rata Sumatera Barat yakni disamping Kota Bukittinggi, Kota solok, juga Kota Payakumbuh dan Kota Padang, sedangkan tiga Kota lainnya yakni Kota Sawahlunto, Kota Pariman dan Kota Padang Panjang berada di bawah rata-rata provinsi Sumatera Barat. Sementara itu, terdapat 5 wilayah kabupaten yang sudah memiliki angka APK SMA/SMK diatas rata-rata provinsi Sumatera Barat yakni Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Mentawai, Pasaman Barat dan Pesisir Selatan. Sedangkan

terdapat 6 kabupaten yang memiliki angka APK SMA/SMK yang berada di bawah rata-rata APK Sumatera Barat yakni kabupaten Solok, Agam, Tanah Datar , Solok Selatan, Dharmasraya dan 50 Kota.

Angka partisipasi kasar (APK) ini menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah tanpa mempertimbangkan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Jika angka APK mencapai 100, Ukuran APK ini menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki kemampuan untuk menampung penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. Berdasarkan konsep APK ini, maka belum ada kabupaten dan Kota mencapai APK SMA/SMK 100. Hal ini berimplikasi bahwa masih ada penduduk usia sekolah SMA/SMK yang belum duduk dibangku pendidikan SMA/SMK dan gejala ini dominan pada tiga kabupaten yakni, Kepulauan Mentawai, Pasaman, dan kabupaten 50 Kota.



Gambar 1.1.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi Sumatera Barat Menurut Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2020

Gambar 1.1.3. diatas memperlihatkan angka partisipasi murni (APM) yang menggambarkan persentase penduduk usia SMA/SMK yakni 16-18 tahun yang duduk di bangku sekolah SMA/SMK dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun yang ada. Belum adanya kabupaten dan kota yang mencapai angka APM 100 berarti ada indikasi bahwa masih ada penduduk yang berusia SMA yakni 16-18 tahun yang belum berada di level pendidikan ini. APM yang tertinggi dicapai oleh Kota Bukittinggi yakni 94,33 dan Kota Solok mencapai 75,89. Artinya sebanyak 94,33 % penduduk usia SMA 16-18 tahun yang berada di sekolah menikmati bangku pendidikan, sisanya sebanyak 5,67% masih belum masuk sekolah SMA/SMK. Hal ini dapat disebabkan oleh karena

keterbatasan akses terhadap pendidikan SMA/SMK juga disebabkan karena keterbatasan tempat yang tersedia atau daya tampung yang belum mencukupi, ini tentu perlu didalami lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum rencana strategi pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat tentunya mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setara dengan pengaturan kepentingan pembangunan pendidikan. Dasar hukum pembangunan pendidikan yang diacu tersebut adalah:

1. Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU Nomor. 61 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, Dan Riau.
3. UU Nomor. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. UU Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
5. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
6. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
7. PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
8. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.
9. PP No. 047 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar.
10. PP No. 048 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan.
11. PP No. 074 Tahun 2008 Tentang Guru.
12. PP No. 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan PP No: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional.
13. PP No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Dan Penyusunan Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

14. Permendikbud No. 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru.
15. Permendikbud No. 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasional Dan Non Operasional SD/MI/SMP/SMA/SMK.
16. Permendikbud No. 20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
17. Permendikbud No. 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah.
18. Permendikbud No. 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah.
19. Permendikbud No. 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar Dan Menengah.
20. Permendikbud No. 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
21. Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerahtentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Danrencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencanakerja Pemerintah Daerah.
22. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
26. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/16/SJ tanggal 4 Januari 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Pasca Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020.
27. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2021.
28. Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat.
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No.8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
30. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah.
31. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
32. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 68 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah (OPD) pendidikan provinsi Sumatera Barat dimaksudkan agar Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat memiliki arah pembangunan pendidikan selama 5 tahun ke depan. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan pendidikan di provinsi Sumatera Barat
2. Menentukan arah kebijakan, strategi dan indikasi program dan kegiatan pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat dalam kurun waktu 2021-2026 sesuai dengan tujuan pembangunan pendidikan Sumatera Barat dalam RPJMD tahun 2021-2026.
3. Menyusun indicator kinerja program dan kegiatan serta pendanaan indikatif pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Renstra kementerian pendidikan dan kebudayaan RI tahun 2021-2026 dan RPJMD provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan rencana strategis pembangunan pendidikan provinsi Sumatera Barat dapat dikemukakan sebagai berikut:

##### Bab I Pendahuluan

###### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah, serta penyebab harus dilakukan perubahan terhadap Renstra Perangkat Daerah

###### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang

dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah

### 1.4 Dasar Pertimbangan Perubahan

Memuat dasar/sebab harus dilaksanakannya Perubahan Renstra

### 1.5 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

### 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawahkepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata

laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

## Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Pendidikan Sumatera Barat

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan

## 5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah

Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

### Bab IV Tujuan dan Sasaran

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel

### Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang disajikan dalam tabel Tabel di atas dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah. Jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan tersebut.

### Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif, termasuk didalamnya perubahan yang dilakukan. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

## Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## Bab VIII Penutup

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**

Pada Bab II ini Rencana Strategis Pembangunan Pendidikan Sumatera Barat memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraantugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telahdihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode 2016-2021, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode 2016-2021, danmengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perludiatasi melalui Renstra Dinas Pendidikanprovinsi Sumatera Barat periode 2021-2026.

**2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat**

Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Pergub Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Pergub Nomor 68 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat sehingga terjadi perubahan bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang sebelumnya diatur dalam Pergub Nomor 46 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Serta Pergub Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan. Dinas Pendidikan memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) sejumlah 1 (satu) unit dan Cabang Dinas (Cabdin) sejumlah 8 (delapan) yang terdiri dari:

- Balai Teknologi dan Komunikasi Pendidikan
- Cabang Dinas Wilayah I (Bukittinggi, Padang Panjang dan Kab. Agam)
- Cabang Dinas Wilayah II (Pariaman dan Kab. Padang Pariaman)
- Cabang Dinas Wilayah III (Solok, Kab. Solok dan Kab. Solok Selatan)
- Cabang Dinas Wilayah IV (Payakumbuh, Kab. Tanah Datar dan Kab. Lima Puluh Kota)
- Cabang Dinas Wilayah V (Sawahlunto, Kab. Sijunjung dan Kab. Dharmasraya)
- Cabang Dinas Wilayah VI (Kab. Pasaman dan Kab. Pasaman Barat)
- Cabang Dinas Wilayah VII (Kab. Pesisir Selatan)
- Cabang Dinas Wilayah VIII (Kab. Kepulauan Mentawai)

Dengan dilimpahkannya kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus ke daerah provinsi (UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah) maka Dinas Pendidikan memiliki 236 (dua ratus tiga puluh enam) Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sebagai satuan pendidikan menengah yang dikelola Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat yang merupakan jenjang pendidikan menengah pada pendidikan formal setelah lulus Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, 111 (seratus sebelas) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang dikelola Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP/MTs atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs, selain itu Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat juga mengelola Sekolah Luar Biasa Negeri (SLBN) yang diperuntukkan bagi anak yang berkebutuhan khusus sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sekolah.

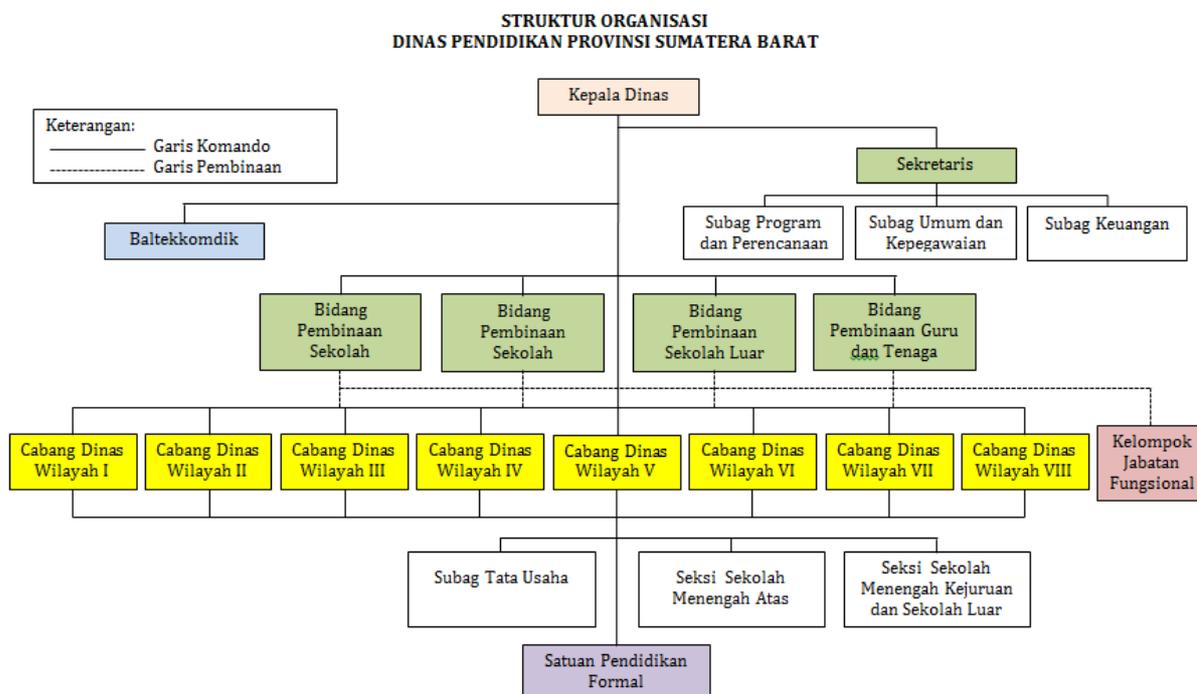
Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 maka Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Guna melaksanakan tugas tersebut Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pendidikan;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan; dan
5. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala dinas pendidikan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas pendidikan. Uraian tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi;
2. Mengkoordinasikan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
3. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pendidikan yang menjadi wewenang Dinas Pendidikan;
4. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
5. Melaksanakan pembinaan dan penilaian prestasi kerja pegawai;
6. Melaksanakan tugas pembantuan; dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat mempunyai struktur organisasi sebagai berikut:



Gambar 2.1.1. Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Susunan organisasi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Kepala Dinas dengan uraian sebagai berikut:

1. Bagian Sekretariat,
2. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA),
3. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK),
4. Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa (SLB),
5. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK),
6. Kelompok Jabatan Fungsional,
7. Cabang Dinas; dan
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

Bagian Sekretariat terdiri dari 3 sub bagian yakni sub bagian program dan perencanaan, sub bagian umum dan perlengkapan dan sub bagian keuangan. Bagian Sekretariat memiliki tugas pokok yaitu

melaksanakan fungsi Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan umum dan kepegawaian, keuangan dan perencanaan program. Untuk melaksanakan tugas pokok ini sekretaris Dinas memiliki sejumlah fungsi yang dapat dilihat secara detil pada Peraturan Gubernur No. 68/2020 tentang tugas pokok dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat, dimana terdapat 7 tugas pokok untuk sub bagian program dan perencanaan, 13 tugas pokok untuk sub bagian umum dan kepegawaian dan 11 tugas pokok untuk sub bagian keuangan. Sehingga bagian Sekretariat memiliki 31 total tugas pokok.

Adapun Rincian tugas pokok dan fungsi Sekretariat dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang program kepada unit organisasi di lingkup dinas;
2. Menyusun konsep rencana strategis dinas;
3. Menyusun perencanaan tahunan dinas dan perencanaan lainnya;
4. Menyiapkan penyusunan penerapan standar pelayanan minimal bidang pendidikan;
5. Menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
6. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
7. Menyajikan data pelaksanaan kegiatan dinas;
8. Menyusun laporan tahunan kegiatan dinas;
9. Menyusun konsep pembuatan profil pendidikan;
10. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
11. Melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan aset/barang milik negara;
12. Mengelola data dan informasi pendidikan;
13. Menyelenggarakan penatausahaan dan pelaporan keuangan;
14. Menyelenggarakan urusan organisasi dan tatalaksana;

15. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
16. Menyelenggarakan urusan kepegawaian;
17. Menyusun rancangan peraturan perundang-undangan;
18. Menyelenggarakan publikasi dan hubungan masyarakat;
19. Menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
20. Menyelenggarakan kerjasama kelembagaan;
21. Menyelenggarakan administrasi kearsipan;
22. Menyelenggarakan administrasi perpustakaan; dan
23. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang pembinaan sekolah menengah atas (SMA) terdiri dari 3 seksi dengan 11 tugas pokok yaitu seksi kurikulum dan penilaian, seksi peserta didik dan seksi sarana prasarana.

Bidang pembinaan sekolah menengah kejuruan (SMK) terdiri dari 3 seksi dengan 9 tugas pokok yaitu seksi kurikulum dan penilaian, seksi peserta didik dan seksi sarana prasarana.

Adapun tugas pokok pendidikan menengah adalah melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian, Peserta didik serta Sarana Prasarana. Dalam melaksanakan tugas pokoknya ini, bidang pendidikan menengah memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan kurikulum dan penilaian;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan peserta didik dan penguatan karakter;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan sarana prasarana.

Bidang pembinaan sekolah luar biasa (SLB) terdiri dari 3 seksi dengan 9 tugas pokok yaitu seksi kurikulum dan penilaian, seksi peserta didik dan seksi sarana prasarana.

Bidang pembinaan sekolah luar biasa memiliki tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kurikulum dan peserta didik, sarana prasarana dan tugas pembantuan. Untuk melaksanakan tugas pokoknya ini, maka bidang pembinaan sekolah luar biasa dan pendidikan berkebutuhan khusus ini berfungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kurikulum dan peserta didik bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan sarana dan prasarana bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa;
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Tugas Pembantuan.

Bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan (GTK) terdiri dari 3 seksi dengan 5 tugas pokok yaitu seksi guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah atas, seksi guru dan tenaga kependidikan sekolah menengah kejuruan dan seksi guru dan tenaga kependidikan sekolah luar biasa.

Bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan memiliki tugas pokok menyelenggarakan manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Untuk melaksanakan tugas pokoknya ini, maka bidang pembinaan guru dan tenaga kependidikan ini berfungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja di bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang meliputi pendataan, peningkatan kualifikasi, peningkatan kompetensi,

sertifikasi, pengembangan karir, peningkatan kesejahteraan dan pemberian penghargaan.

2. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja tentang pembinaan calon kepala sekolah, pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; dan
3. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja penyediaan wadah bagi guru untuk mempublikasikan penulisan karya ilmiah baik cetak maupun elektronik.

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Menengah yang dibentuk sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah kerja tertentu yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan tugas Dinas dibidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Untuk melaksanakan tugas pokoknya ini maka Cabang Dinas memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
2. Pelaksanaan koordinasi dan teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
3. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan sub urusan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa;
4. Pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas Pendidikan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Unit pelaksana teknis memiliki tugas pokok adalah melaksanakan sebahagian tugas teknis dan operasional dinas pendidikan provinsi Sumatera barat sesuai dengan bidangnya, dengan wilayah kerja kabupaten dan kota se Sumatera Barat.

Berdasarkan kondisi kelembagaan dan struktur organisasi Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa Dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat terdiri dari: Sekretariat, Pembinaan SMA, Pembinaan SMK, Pembinaan SLB, Pembinaan GTK, Cabang Dinas dan ditambah dengan dua urusan yakni UPTD dan kelompok fungsional, sehingga keseluruhan terdapat 64 tugas pokok di bidang pelayanan Pendidikan di Provinsi Sumatera Barat.

## 2.2 Sumberdaya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Sumberdaya dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat sampai dengan akhir Tahun 2020 tercatat sebanyak 12.752 orang, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1.

Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan berdasarkan Golongan dan Eselon Tahun 2020

NO	Gol/ Ruang	Eleson				Non Eleson		Jumlah
		I	II	III	IV	Tenaga Fungsional	Staf	
	<b><u>GOLONGAN. IV</u></b>							0
1	Golongan. IV/e						0	0
2	Golongan. IV/d					2	0	2
3	Golongan. IV/c		1			27	0	28
4	Golongan. IV/b			5		1557	2	1564
5	Golongan. IV/a				19	3604	32	3655
	<b>Jumlah Gol. IV</b>		<b>1</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>5190</b>	<b>34</b>	<b>5249</b>
	<b><u>Golongan. III</u></b>							
1	Golongan III/d				4	2095	117	2216
2	Golongan III/c				0	2046	86	2132
3	Golongan III/b				2	1105	336	1443

NO	Gol/ Ruang	Eleson				Non Eleson		Jumlah
		I	II	III	IV	Tenaga Fungsional	Staf	
4	Golongan III/a				0	211	683	894
	<b>Jumlah Gol. III</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>5457</b>	<b>1222</b>	<b>6685</b>
	<b><u>Golongan. II</u></b>							
1	Golongan II/d					8	70	78
2	Golongan II/c					10	70	80
3	Golongan II/b					18	204	222
4	Golongan II/a					0	16	16
	<b>Jumlah Gol. II</b>					<b>36</b>	<b>360</b>	<b>396</b>
	<b><u>Golongan. I</u></b>							
1	Golongan I/d						23	23
2	Golongan I/c						6	6
3	Golongan I/b						13	13
4	Golongan I/a						1	1
	<b>Jumlah Gol. I</b>						<b>42</b>	<b>42</b>
	<b>JML TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5</b>	<b>25</b>	<b>10.683</b>	<b>1.658</b>	<b>12.372</b>

Perubahan dinas pendidikan provinsi Sumatera Barat dan telah dipisahkan dengan urusan kebudayaan yang telah menjadi dinas berdiri sendiri, sehingga telah merampingkan struktur organisasi sesuai dengan SK Gubernur Sumatera Barat nomor 78 tahun 2016 dan perda nomor 8 tahun 2016 dinas pendidikan merupakan dinas tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan. Sedangkan Dinas kebudayaan setelah terpisah dari dari pendidikan menangani urusan pemerintahan bidang kebudayaan dengan tipe dinasnya B.

Selanjutnya aset dan modal yang dimiliki dan dikuasai oleh dinas pendidikan Sumatera Barat adalah sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah luar biasa (SLB), jumlah guru dan tenaga kependidikan dari semua sekolah menengah di Sumatera Barat. Hal ini merupakan aset dan modal dalam membangun mutu pendidikan di Sumatera Barat.

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Sumatera Barat**

Kinerja layanan Dinas pendidikan mengacu kepada tatakelola sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah khusus (SMK) dan sekolah luar biasa yang terdiri dari ketersediaan sarana dan prasarana mulai dari ruangan belajar, laboratorium, perpustakaan, bengkel, studio dan semua para sarana yang mendukung kepada penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif dan suasana sekolah yang menyenangkan, seperti lingkungan fisik sekolah yang sejuk, nyaman, asri bahkan lingkungan social sekolah yang mendukung kepada upaya penanaman nilai-nilai kejujuran, empati, rasa solidaritas dan sikap menunjung tinggi kebinekaan, sebagai konsekwensi dari masyarakat Indonesia yang majemuk. Disamping itu, kinerja dinas pendidikan juga terlihat dari pencapaian kinerja pelayanan dinas pendidikan selama periode 2016-2020.

Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dengan berdasar pada realisasi target dengan target pada Renstra dan RPJMD, sebagai berikut:

Tabel 2.3.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	APM SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C				73.35	68.85	71.03	73.27	74.35	72,23	72.77	67.47	72.63	73.13	98.47	105.69	94.99	99.13	98.36
2.	APK SMA/SMK/MA/SMA LB/Paket C				96.88	86.20	86.58	86.96	97.8	84,92	85.23	94.74	95.58	91.7	87.65	98.87	109.42	109.91	93.76
3.	Angka Putus SMA				0.83	0.004	0.003	0.002	0.63		0.77	0.52	0.0019	0.63		57.50		95.00	100
4.	Angka Putus SMK				0.92	0.01	0.01	0	0.73		1.63	1.62	0	0.67				100	91.78
5.	Indek integritas UN SMA/SMK					66.57	67.52	68.49	69.47		66.57	67.52	88.24	-		100	100	128.84	-
6.	Indek Integritas Peserta Didik				66	68.27	71.92	76.34	82		82.61	96.9	76.18	78.68		121.00	134.73	99.79	95.95
7.	Angka Kelulusan SMA/MA/LB/Paket C				97.21	100.83	101.72	102.62	98.25		99.24	99.32	97	98.58		98.42	97.64	94.52	100.34
8.	Angka Kelulusan SMK				98.7	97.30	97.35	97.52	98.15	98.94	99.30	98.91	99.16	95.98	100.24	102.05	101.6	101.68	97.79
9.	Angka tidak melanjut ke SMA				4.02	4.86	5.31	5.81	2.74		0.27	0.53	2.54	0.45		5.56	9.98	43.72	183.58
10.	Kompetensi tenaga pendidik/ UKG				59.93	65.18	70.43	75.68	80.93	63.62	65.18	68.74	78.02	89.50	106.16	100	97.6	103.09	110.59
11.	Jumlah sekolah menengah yang terakreditasi minimal B				72.23	85.07	85.96	86.65	78.18		85.07	85.96	89.24	77.16		100	100	102.99	98.70
12.	Jumlah sekolah Luar Biasa yang terakreditasi minimal B				72.23	61.32	65.82	71.15	78.18		61.32	65.82	99	51.63		100	100	139.14	66.04

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	TARGET Renstra SKPD Tahun ke-					REALISASI Capaian Tahun ke-					RASIO Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
13.	Jumlah lulusan SMA yang melanjutkan ke PT				42.98	44.99	48.08	51.38	50		42.77	43.56	42.16	27.13		95.07	90.60	82.06	54.26
14.	Jumlah lulusan SMK yang diterima di DUDI (Dunia Usaha dan Industri)				28	27.71	28.79	29.92	50		32	28	46.12	27.59		115.48	97.26	154.14	55.18

Secara umum, indikator kinerja pembangunan Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat telah mencapai target yang ditetapkan dalam rencana strategis dan hanya terdapat beberapa indikator yang tidak mencapai target. Memperhatikan capaian kinerja Dinas Pendidikan untuk sasaran pemda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Capaian APM dan APK baik untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus maka dapat diperhatikan terjadi peningkatan/melampaui target yang diharapkan dan ada pula yang menurun dari target yang diharapkan. Penyebab penurunan ini adalah:
  - Adanya siswa putus sekolah atau DO (dropout) dalam masa pendidikannya
  - Faktor kesadaran masyarakat
  - Faktor kondisi ekonomi keluarga
- Capaian Angka Putus SMA dan SMK mengalami peningkatan dan penurunan dari target yang diharapkan. Perkembangan terjadi penurunan ini menandakan sudah adanya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya pendidikan untuk anaknya. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi naiknya angka putus sekolah adalah :
  - Faktor ekonomi dari keluarga yang tidak mampu
  - Faktor kesadaran dari keluarga (yang masih mengutamakan faktor lain di luar pendidikan)
- Perkembangan terhadap Angka Kelulusan SMA yaitu menurun di tahun 2019 dan 2020. Sementara dari Kemendikbud RI, untuk UN terakhir dilaksanakan pada Tahun 2019 untuk pendidikan menengah dan ditiadakan untuk tahun berikutnya. Penurunan di tahun 2019 dan 2020 ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:
  - Standar kelulusan minimal tahun tersebut masih terlalu tinggi
  - Faktor materi pembelajaran yang masih rendah

- Perkembangan dari Angka Kelulusan SMK mengalami peningkatan dan penurunan yang terjadi selama lima tahun, hal ini bisa disebabkan oleh:
  - Faktor standar kelulusan minimal masih tinggi
  - Faktor materi pembelajaran siswa yang masih rendah
- Capaian Kompetensi Tenaga Kependidikan (Kepala sekolah dan pengawas sekolah, laboran, pustakawan, dan pegawai TU sekolah) mengalami kenaikan yang terjadi setiap tahunnya. Harapan kedepan terjadi peningkatan setiap tahunnya yang nantinya juga akan terdapat korelasi dengan operasional sekolah sesuai Standar Pendidikan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diterapkan di Satuan Pendidikan.

Faktor-faktor pendorong yang mendukung tercapainya target per indikator dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah adanya dukungan Sumber Daya Manusia pelaksana yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitas serta pengupayaan pelayanan yang bermutu dan berkualitas dalam setiap jenjang pendidikan dan jenis pendidikan dibawah wewenang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat**

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Renstra Kemendikbud 2020-2024. Yakni tantangan terhadap penguatan pendidikan karakter yang sesuai dengan kebudayaan setempat dan tahapan tumbuh-kembang peserta didik. Tantangan terhadap optimalisasi kegiatan ekstra-kurikuler kesenian sebagai wadah pendidikan karakter, serta tantangan terhadap sinkronisasi kebijakan Pemda dengan Kemendikbud mengenai Bahasa dan Sastra Daerah/Indonesia.

Pada periode 2020-2024, Kemendikbud sebagai kementerian yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan, sejalan dengan pelaksanaan misi Nawacita

dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 berupaya melakukan transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Indonesia. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa dalam menghadapi tantangan Abad 21, perlu melakukan transformasi dan perbaikan signifikan di bidang pendidikan dan kebudayaan Indonesia. Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang pendidikan Kemendikbud akan terus meningkatkan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan pendidikan dasar dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, Kemendikbud juga melaksanakan pembangunan pendidikan tinggi di seluruh wilayah Indonesia. Agar terwujud masyarakat Indonesia yang merupakan pembelajar seumur hidup, layanan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi perlu diperluas tanpa pembedaan atas faktor apapun. Satuan pendidikan, keluarga, masyarakat, dan sektor swasta bersama-sama dalam mengupayakan pengembangan potensi peserta didik lewat olah hati, pikir, rasa dan raga yang seimbang demi terwujudnya insan-insan yang berketuhanan dan berakhlak mulia. Hal tersebut tidak dapat terjadi tanpa komitmen semua pemangku kepentingan pendidikan, baik yang berada dalam pemerintahan maupun masyarakat luas, dalam mengelola dan membiayai pembangunan pendidikan dan kebudayaan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Pendidikan sebagai institusi yang melaksanakan kewenangan di bidang pendidikan harus melaksanakan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan amanat Permendikbud nomor 28 Tahun 2018 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisikan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan yang ada di Indonesia yaitu:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi

3. Standar Proses
4. Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan Pendidikan dan
8. Standar Penilaian Pendidikan.

Kedelapan Standar Nasional Pendidikan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu di Provinsi Sumatera Barat. Tantangan pembangunan pendidikan perlu mendapat perhatian khusus meskipun keberhasilan pendidikan hingga tahun 2020 sudah terlihat nyata dengan menurunnya angka putus sekolah, meningkatnya partisipasi pendudukan yang berusia 7 hingga 18 tahun untuk melanjutkan pendidikan, serta meningkatnya sarana dan prasarana pendidikan. Namun, masih banyak permasalahan yang dalam kurun waktu lima tahun mendatang yang perlu mendapat perhatian. Berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pendidikan lima tahun ke depan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelayanan dan kualitas pendidikan.
2. Era globalisasi menimbulkan pendidikan biaya tinggi.
3. Kemerosotan moral dan akhlak generasi muda peserta didik.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana dasar sesuai dengan SPM wajib pelayanan dasar bidang pendidikan pada semua jenjang pendidikan.
5. Aksesibilitas penyelenggaraan pendidikan pada jenjang menengah masih belum merata.

Dalam menghadapi tantangan tersebut, Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat mempunyai beberapa peluang yang akan digunakan dalam menghadapi tantangan. Peluang ini nantinya diharapkan dapat memperlancar Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan tupoksinya.

1. Tingkat kepedulian masyarakat yang cukup tinggi terhadap pendidikan
2. Dukungan stakeholder dan swasta dalam pengembangan pendidikan
3. Berkembangnya lembaga-lembaga pendidikan formal dan non formal
4. Berkembangnya teknologi, informasi dan komunikasi
5. Antusias pemerintah dan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan berkarakter ( berahlak mulia ).
6. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS).
7. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antarfungsi baik di internal maupun internal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PENDIDIKAN SUMATERA BARAT**

Pada bab ini dikemukakan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan dinas pendidikan, telaahan visi, misi dan program dinas pendidikan, dan telaahan renstra kementerian pendidikan dan kebudayaan, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat**

Pembangunan pendidikan di Sumatera Barat akan difokuskan pada peningkatan kapasitas satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dalam memperluas layanan dan meningkatkan modernisasi penyelenggaraan proses pembelajaran di seluruh wilayah Sumatera Barat, sehingga Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dapat mendorong penguatan layanan pendidikan dan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Adapun bentuk permasalahan dan tantangan pembangunan Pendidikan di Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Belum terpenuhinya kebutuhan/kekurangan sarana dan prasarana pendidikan, dalam rangka mengatasi daya tampung peserta didik dan peningkatan mutu proses pembelajaran di sekolah.
- b. Kebutuhan kurikulum yang bermuatan kearifan lokal belum bersinergi antara pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- c. Masih belum meratanya kesejahteraan guru terutama yang berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).
- d. Belum terpenuhinya kualitas, kuantitas dan distribusi guru dan tenaga kependidikan.
- e. Masih kurangnya SMK yang unggul berbasis potensi daerah maupun jurusan pendidikan yang ramah dunia kerja.
- f. Belum optimalnya pengembangan karakter berdasarkan minat, bakat dan kreativitas siswa.

- g. Masih kurangnya pendidikan kewirausahaan pada pendidikan vokasi secara berkelanjutan.
- h. Belum meratanya akses dan mutu sekolah luar biasa dan sekolah inklusi sehingga lulusan SLB belum terserap secara maksimal di dunia kerja.
- i. Masih lambatnya transformasi digital dalam implementasi proses belajar mengajar dan administrasi pendidikan.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih**

Penyusunan dokumen perencanaan strategis pembangunan pendidikan Sumatera Barat tentunya tidak akan terlepas dari rencana pembangunan pendidikan pada provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumatera Barat tahun 2021-2026.

Visi, misi dan tujuan pembangunan pendidikan di Sumatera Barat telah dirumuskan dengan mengacu kepada visi, misi dan tujuan pembangunan pendidikan secara nasional ini, disamping yang tidak kalah pentingnya adalah sangat berpedoman juga kepada visi, misi dan tujuan yang telah dirumuskan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang tentunya merupakan turunan dari visi, misi dan tujuan dari Gubernur Sumatera Barat terpilih pada periode 2021-2026. Visi pembangunan Sumatera Barat yang dirumuskan dalam RPJMD tahun 2021-2026 itu adalah:

#### **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**

Visi Gubernur Sumatera Barat yang terpilih ini telah dirumuskan ke dalam misinya sehingga mudah dilaksanakan dan menjadi arah pembangunan Sumatera Barat secara umum ke depan, tentunya tidak terlepas pula dengan pembangunan pendidikannya. Adapun misi pembangunan Sumatera Barat ke depan itu adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing.
2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah.
3. Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

4. Meningkatkan usaha perdagangan dan Industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.
7. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas.

Dengan berpijak pada visi dan misi pembangunan daerah, maka tujuan dan sasaran pembangunan Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang dapat mendukung pembangunan dibidang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pendidikan Sumaera Barat Tahun 2021-2026

Misi		Tujuan RPJMD		Sasaran RPJMD		Indikator Sasaran RPJMD	
1	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing	1	Mewujudkan sumber daya manusia sehat, unggul, dan berdaya saing	1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah
2	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak	2	Mewujudkan ABS-SBK sebagai falsafah kehidupan masyarakat	2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2	Harapan Lama Sekolah
				3	Meningkatnya daya saing tenaga kerja	3	Angka Harapan Hidup (AHH)
				4	Meningkanya budaya literasi masyarakat	4	Persentase Angkatan kerja berpendidikan menengah keatas (Sakernas BPS)
				5	Meningkatnya ketahanan sosial budaya masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK	5	Indeks Ketahanan Sosial Budaya (Dimensi IPK BPS)
				6	Meningkatnya Ketahanan Keluarga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	6	Nilai Budaya Literasi (Dimensi IPK BPS)

### 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

#### 3.3.1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagai kementerian yang mengemban amanat mengendalikan pembangunan SDM melalui ikhtiar bersama semua anak bangsa untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memajukan kebudayaan, Kemendikbud dalam menentukan visi kementerian berdasarkan pada

capaian kinerja, potensi dan permasalahan, Visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020-2024, serta Visi Indonesia 2025. Adapun Visi Kemendikbud 2020-2024 adalah:

**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi, Presiden untuk :**

**Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global.**

Visi tersebut di atas menggambarkan komitmen Kemendikbud mendukung terwujudnya visi dan misi Presiden melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan yang dimiliki secara konsisten, bertanggung jawab, dapat dipercaya, dengan mengedepankan profesionalitas dan integritas. Oleh karena itu, perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan akan mengedepankan inovasi guna mencapai kemajuan dan kemandirian Indonesia. Sesuai dengan kepribadian bangsa yang berlandaskan gotong royong, Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan kebudayaan, bekerja bersama untuk memajukan pendidikan dan kebudayaan sesuai dengan Visi dan Misi Presiden tersebut.

### **Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Untuk mendukung pencapaian Visi Presiden, Kemendikbud sesuai tugas dan kewenangannya, melaksanakan Misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita kedua, yaitu menjabarkan misi nomor (1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia; nomor (5)Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa; dan nomor (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya. Untuk itu, misi Kemendikbud dalam melaksanakan Nawacita kedua tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi.
2. Mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra.
3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan.

### **Tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**

Perumusan tujuan Kemendikbud ditujukan untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Kemendikbud menetapkan lima tujuan:

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif.
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik .
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter.
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarusutamaannya dalam Pendidikan.
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

### **Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan dan kebudayaan**

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan pertama — Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kedua — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada

perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.

3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan ketiga — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan keempat — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan tujuan kelima — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

### **Arah dan Kebijakan Kemendikbud 2020-2024**

Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu 2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.

Secara lebih detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat, sebagaimana tertuang dalam gambar 3.3.1.:

Gambar 3.3.1. Kebijakan Merdeka Belajar



Sumber: Peta Jalan Pendidikan Indonesia, 2020

Gambar 3.3.1. di atas menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat terwujud secara optimal melalui:

- (1) Peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen masyarakat, dan budaya;
- (2) Peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan pendidikan;
- (3) Perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan
- (4) Penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

Perubahan yang diusung oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan terjadi pada kategori:

- (1) Ekosistem pendidikan;
- (2) Guru;
- (3) Pedagogi;
- (4) Kurikulum; dan
- (5) Sistem penilaian.

Pada ekosistem pendidikan, Kemendikbud akan mengubah pandangan dan praktik yang bersifat mengekang kemajuan pendidikan, seperti penekanan pada pengaturan yang kaku, persekolahan sebagai tugas

yang memberatkan, dan manajemen sekolah yang terfokus pada urusan internalnya sendiri menjadi ekosistem pendidikan yang diwarnai oleh suasana sekolah yang menyenangkan, keterbukaan untuk melakukan kolaborasi lintas pemangku kepentingan pendidikan, dan keterlibatan aktif orang tua murid dan masyarakat.

Berkaitan dengan guru, Kebijakan Merdeka Belajar akan mengubah paradigma guru sebagai penyampai informasi semata menjadi guru sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar. Dengan demikian guru memegang kendali akan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di ruang kelasnya masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya bagi profesi guru sebagai fasilitator dari beragam sumber pengetahuan akan diwujudkan melalui pelatihan guru berdasarkan praktik yang nyata, penilaian kinerja secara holistik, dan pembenahan kompetensi guru. Dalam hal pedagogi, Kebijakan Merdeka Belajar akan meninggalkan pendekatan standardisasi menuju pendekatan heterogen yang lebih paripurna memungkinkan guru dan murid menjelajahi khasanah pengetahuan yang terus berkembang. Murid adalah pemimpin pembelajaran dalam arti merekalah yang membuat kegiatan belajar mengajar bermakna, sehingga pembelajaran akan disesuaikan dengan tingkatan kemampuan siswa dan didukung dengan beragam teknologi yang memberikan pendekatan personal bagi kemajuan pembelajaran tiap siswa, tanpa mengabaikan pentingnya aspek sosialisasi dan bekerja dalam kelompok untuk memupuk solidaritas sosial dan keterampilan lunak (*soft skills*). Dengan menekankan sentralitas pembelajaran siswa, kurikulum yang terbentuk oleh Kebijakan Merdeka Belajar akan berkarakteristik fleksibel, berdasarkan kompetensi, berfokus pada pengembangan karakter dan keterampilan lunak, dan akomodatif terhadap kebutuhan DU/DI. Sistem penilaian akan bersifat formatif/mendukung perbaikan dan kemajuan hasil pembelajaran dan menggunakan portofolio. Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi Kemendikbud. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud untuk periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

## 1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan

Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan adalah:

- a. Angka partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini meningkat;
- b. Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun tuntas dan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun meningkat; dan
- c. Angka partisipasi pendidikan tinggi meningkat.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan peningkatan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun adalah:

1. Memenuhi kebutuhan daya tampung untuk semua jenjang pendidikan melalui pembangunan sekolah baru dan ruang kelas baru yang disesuaikan dengan kebutuhan, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
2. Mempertahankan kapasitas terpasang dengan rehabilitasi fasilitas yang rusak, termasuk di wilayah yang terkena dampak bencana;
3. Membina sekolah swasta agar kualitasnya sejajar atau bahkan lebih baik dari sekolah negeri dengan tetap mempertahankan keunggulan tertentu sesuai ciri khasnya sebagai sekolah swasta, untuk membantu pencapaian Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun; dan
4. Melaksanakan program afirmasi bagi daerah khusus termasuk anak dengan kondisi tidak sekolah atau dengan kebutuhan khusus akan dilakukan melalui berbagai langkah diantaranya:
  - a. Melanjutkan Program Indonesia Pintar (PIP) dan pelaksanaan program retrieval untuk anak putus sekolah;
  - b. Membuat program/strategi untuk membantu anak-anak yang memiliki kondisi tidak sekolah atau kebutuhan khusus, termasuk afirmasi bagi anak-anak tenaga kerja Indonesia di luar negeri;

- c. Menyediakan layanan pendidikan untuk anak dari daerah 3T yang tidak memungkinkan pembangunan sekolah di daerahnya, misalnya melalui sekolah garis depan atau sekolah berasrama;
  - d. Memberikan mekanisme belajar (seperti cara penyampaian materi pelajaran dan pelaksanaan asesmen) yang disesuaikan dengan kondisi hidup anak yang khusus, seperti anak rimba, anak nelayan, dan anak yang berkonflik dengan hukum; dan
  - e. Melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat untuk dapat menemukan anak-anak yang tidak bersekolah untuk dapat didorong kembali mengikuti pendidikan baik jalur formal maupun nonformal.
2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan Kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan dan pemerataan mutu layanan pendidikan adalah:
- a. Kepemimpinan pendidikan yang berorientasi kepada kepemimpinan instruksional (instructional leadership) menguat;
  - b. Kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan merata dan meningkat;
  - c. Percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan terlaksana;
  - d. Mutu layanan PAUD satu tahun pra-SD meningkat;
  - e. Teknologi informasi dan komunikasi mendukung peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan;
  - f. Penjaminan mutu semakin kuat dan bermakna;
  - g. Proses pembelajaran meningkat mutunya;
  - h. Kapasitas dan pemanfaatan penilaian formatif dan portofolio di sekolah meningkat;
  - i. Jumlah perguruan tinggi kelas dunia bertambah; dan

- j. Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas dan diakui industri.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan adalah:

1. Mengembangkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui skema Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak;
2. Mengembangkan Balai Guru Penggerak (Center of Excellence) di setiap provinsi untuk menciptakan ekosistem belajar guru yang berdaya, aktif, kolaboratif, inklusif, berkelanjutan dan inovatif sehingga dapat menunjang pembelajaran siswa di sekolah;
3. Melakukan transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) melalui seleksi masuk yang lebih baik, kurikulum yang berorientasi pada praktik dan penggunaan teknologi, pengajar yang menguasai praktik di sekolah, dan ujian kelulusan yang menekankan keterampilan mengajar dan kemampuan berefleksi;
4. Berkonsultasi dengan pemerintah daerah agar Guru Penggerak dapat diarahkan menjadi pemimpin-pemimpin pendidikan, seperti menjadi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Kepala Dinas Pendidikan;
5. Bekerja sama secara erat dengan pemerintah daerah untuk melakukan redistribusi guru secara lebih merata dan memastikan rekrutmen guru yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di tingkat satuan pendidikan;
6. Menerapkan berbagai inovasi termasuk multi-subject teaching untuk meningkatkan ketersediaan guru dengan tetap memegang prinsip efisiensi dan efektivitas; dan
7. Membuka akses satuan pendidikan dan guru terhadap pembiayaan di luar APBN seperti: pembiayaan oleh daerah,

pihak ke-3 (contoh: Pengabdian Masyarakat Perguruan Tinggi, CSR, investasi DU/DI) ataupun dari dana BOS dan TPG untuk mendukung pembiayaan bagi upaya pemerataan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka percepatan pemerataan kualitas layanan pendidikan adalah:

1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan yang berkualitas;
2. Memungkinkan pemanfaatan sumber daya pendidikan secara bersama antar satuan pendidikan dalam satu daerah (termasuk pendidik dan fasilitas lainnya);
3. Merancang intervensi yang memperhitungkan situasi di setiap daerah dan setiap satuan pendidikan;
4. Mempertimbangkan mekanisme intervensi dan pembiayaan berbasis kinerja;
5. Memastikan seluruh pemangku kepentingan memegang peran sesuai kewenangan; dan
6. Memadukan seluruh sumber daya dari pusat, daerah, satuan pendidikan dan masyarakat dalam melakukan intervensi di setiap daerah.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan mutu pembelajaran adalah:

1. Mengembangkan platform pembelian barang dan jasa bagi sekolah, agar pembelian lebih berkualitas serta mengurangi beban administrasi kepala sekolah dan guru, dengan demikian kepala sekolah dan guru dapat meningkatkan perhatian mereka pada kualitas pembelajaran siswa;
2. Mengembangkan platform identifikasi guru penggerak dari seluruh Indonesia secara massal untuk selanjutnya dimobilisasi menggerakkan guru-guru lain.

3. Mengembangkan mekanisme untuk mendorong penyediaan materi pengembangan kompetensi guru dan media/alat bantu mengajar yang bermutu dan terstandar;
4. Menyediakan gawai yang sudah diisi dengan materi yang sama (preloaded) untuk mendukung guru di daerah dengan keterbatasan jaringan internet;
5. Menggunakan gawai untuk merekam praktik mengajar untuk mendorong peerreview praktik guru dan juga berbagi praktik yang baik antar guru; dan
6. Meningkatkan mutu data pendidikan dan mengembangkan sistem informasi bagi para pemangku kepentingan.

Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka mewujudkan pendidikan dan pelatihan vokasi untuk Revolusi Industri 4.0 yang berkualitas dan diakui industri:

1. Membuka ruang kerja sama yang erat dengan DU/DI, di mana DU/DI dapat langsung terlibat dalam menginformasikan kebutuhan pasar tenaga kerja dan memastikan kualitas program pendidikan dan pelatihan vokasi dimutakhirkan sesuai dengan standar industri;
2. Membentuk forum kerja sama DU/DI dengan lembaga pendidikan yang relevan agar setiap program pendidikan vokasi baik di SMK, pendidikan tinggi vokasi, maupun kursus dan pelatihan menghasilkan kompetensi lulusan yang standarnya diakui oleh industri;
3. Mengembangkan beberapa SMK menjadi Centers of Excellence guna mempercepat peningkatan kapasitas guru dan pembelajaran siswa-siswi SMK di seluruh Indonesia;
4. Memfasilitasi kerja sama yang mumpuni dengan DU/DI dalam setiap pembukaan atau pengembangan Prodi di pendidikan tinggi vokasi;
5. Meningkatkan kualitas pembelajaran pada pendidikan dan pelatihan vokasi dengan metode problem-based learning agar

- peserta didik dapat mengembangkan technical skills dan soft skills sesuai dengan standar DU/DI;
6. Mendorong pengembangan produk dan atau jasa melalui riset terapan dan inovasi dengan kerja sama industri dan masyarakat;
  7. Peningkatan kapasitas technical skills, soft skills, dan pedagogical skills sumber daya manusia di pendidikan dan pelatihan vokasi (guru/instruktur/dosen/pelatih) agar sesuai dengan standar DU/DI;
  8. Mendorong kapasitas kepemimpinan dan kemampuan manajemen usaha pimpinan (kepala sekolah, direktur) dalam mengembangkan institusi pendidikan dan pelatihan vokasi;
  9. Memberikan kesempatan praktisi industri/profesional untuk mengajar di pendidikan dan pelatihan Vokasi;
  10. Memberikan kesempatan bagi setiap peserta didik untuk melakukan praktik kerja industri dan/atau project work dengan DU/DI;
  11. Memberikan kesempatan profesional atau pekerja untuk kembali ke institusi Pendidikan vokasi dengan mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
  12. Membuat mekanisme insentif yang transparan untuk DU/DI yang terlibat; dan
  13. Menggalang kerja sama yang sinergis dan kolaboratif dengan pemerintah daerah penyelenggaraan Pendidikan SMK.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan Rencana Program (KRP).

Analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan secara umum dimaksudkan untuk menganalisis ketercapaian Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Implementasi TPB/SDGs di Indonesia untuk pencapaian 17 *goals* dengan pengembangan indikator TPB/SDGs 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Analisis pencapaian TPB/SDGs di Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Provinsi Sumatera Barat sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori:

- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target/SS
- b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target/SB
- c. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data/NA

Berdasarkan hasil analisis, capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan provinsi adalah 17 TPB. Jumlah indikator dari 17 TPB yang menjadi kewenangan provinsi adalah 235 indikator. Indikator-indikator ini kemudian dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar pembangunan yaitu: pilar sosial; pilar ekonomi; pilar lingkungan; dan pilar hukum dan tata kelola.

Pembangunan Pendidikan yang Berkualitas berada pada Pilar Pembangunan Sosial. Dimana Indikator TPB/SDGs yang berhubungan dengan Pendidikan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang adalah :

1. Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)
2. Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat
3. Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B

4. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat
5. Rata-rata lama sekolah penduduk umur  $\geq 15$  tahun
6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat
7. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA/ sederajat
8. Persentase angka melek aksara penduduk umur  $\geq 15$  tahun
9. Persentase angka melek aksara penduduk umur 15- 24 tahun dan umur 15-59 tahun
10. Persentase guru SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

#### 3.5.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terbagi dalam layanan umum yang dapat dibaca melalui gambaran umum, sebagai berikut:

Tabel 3.5.1.1. Data Sumber Daya Manusia Pendidikan Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No.	Variabel	SMA	SMK	SLB
1	Sekolah	330	213	153
2	Kelas	5147	3.048	x
3	Siswa Baru	68.548	41.144	x
4	Siswa	149.939	92.161	6.632
5	Lulusan	47.217	26.439	x
6	Guru	11.077	7.554	1.357

Pada tabel diatas merupakan hasil rekapitulasi dari Data Pokok Pendidikan tingkat Satuan Pendidikan Tahun 2020. Dari data pokok tersebut didapatkan hasil perhitungan berdasarkan indikator kinerja yang menggambarkan kondisi pembangunan pendidikan yang telah dicapai selama ini agar diperoleh gambaran secara umum berbagai kendala dan hambatan yang dihadapi selama ini dalam pembangunan di bidang pendidikan di Sumatera Barat.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan untuk Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5.1.2. Indikator Kinerja Pendidikan  
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
1	Harapan lama sekolah	Tahun	14,86	14,02	94,35
2	Rata-rata lama sekolah	Tahun	8,85	8,99	101,58
3	APM SMA/SMK/MA/ SMALB/ Paket C	%	73,3	74,35	101,43
4	Angka Putus SMA	%	0,63	0,63	100,00
5	Angka Putus SMK	%	0,73	0,67	91,78
6	Angka kelulusan SMA	%	98,25	98,58	100,34
7	Angka kelulusan SMK	%	98,15	95,98	97,79

Data dikdasmen yang disajikan diuraikan menjadi 13 variabel data pada tahun 2013/2014. Sebanyak 7 variabel pertama adalah prasarana yang terdiri dari sekolah, rombongan belajar (kelas), ruang kelas, perpustakaan, ruang UKS, tempat olahraga, dan laboratorium, sedangkan 6 variabel berikutnya adalah sumber daya manusia seperti siswa baru, siswa, lulusan, guru, mengulang, dan putus sekolah.

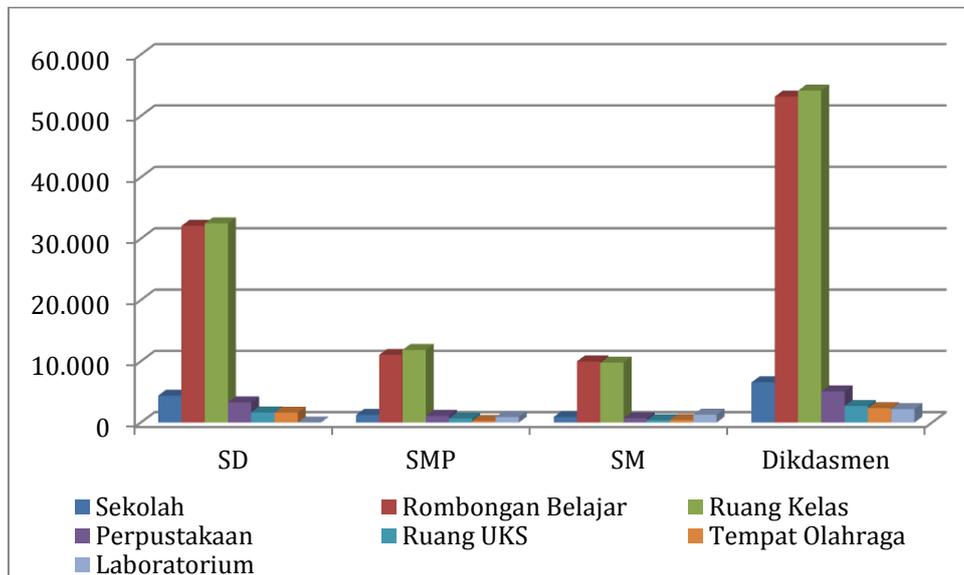
Tabel 3.5.1.3. Data Prasarana Dikdasmen Provinsi Sumatera Barat

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Sekolah	4,401	1,243	921	6,565
2	Rombongan Belajar	32,102	11,061	9,998	53,161
3	Ruang Kelas	32,501	11,855	9,778	54,134
4	Perpustakaan	3,290	1,088	700	5,078
5	Ruang UKS	1,665	667	377	2,709
6	Tempat Olahraga	1,609	287	442	2,338
7	Laboratorium	0	901	1,306	2,207

Berdasarkan Tabel 3.5.1.3. di Sumatera Barat terdapat jumlah sekolah dikdasmen sebesar 6565 buah dengan sekolah terbesar adalah jenjang SD sebesar 4401 sekolah dan terkecil adalah jenjang SM sebesar 921 sekolah. Seperti satuan pendidikan di kabupaten/kota lainnya,

ternyata makin tinggi jenjang pendidikan makin sedikit jumlah satuan pendidikan yang ada jika dibandingkan dengan jenjang pendidikan yang lebih rendah.

Grafik 3.5.1.1. Prasarana Sekolah Dikdasmen Provinsi Sumatera Barat



Tabel 3.5.1.4. Data Sumber Daya Manusia Dikdasmen Provinsi Sumatera Barat

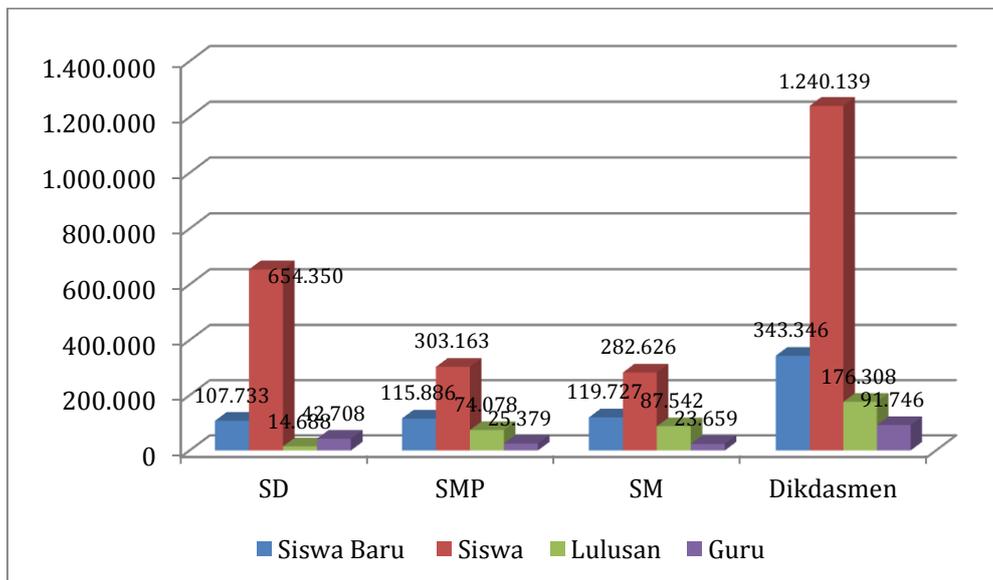
No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Siswa Baru	107,733	115,886	119,727	343,346
2	Siswa	654,350	303,163	282,626	1,240,139
3	Lulusan	14,688	74,078	87,542	176,308
4	Guru	42,708	25,379	23,659	91,746
5	Mengulang	16,261	1,973	1,861	20,095
6	Putus Sekolah	1,327	740	1,580	3,647

Pada Tabel 3.5.1.3. dan 3.5.1.4. diketahui bahwa untuk menampung siswa jenjang SD sebesar 654.350, tersedia 4.401 sekolah dan 32.501 ruang kelas serta rombongan belajar sejumlah 32.102. Hal yang sama untuk menampung siswa jenjang SMP sebesar 303.163 orang, tersedia 1.243 sekolah dan 11.855 ruang kelas dengan jumlah rombongan belajar sebesar 11.061. Untuk menampung siswa jenjang SM sebesar 282.626 orang, tersedia sebesar 921 sekolah dan 9.778 ruang kelas dengan jumlah rombongan belajar sebesar 9.998. Dengan demikian, untuk dikdasmen

telah menampung sebanyak 1.240.139 orang di 6.565 sekolah dan 54.134 ruang kelas dengan jumlah rombongan belajar sebesar 53.161.

Dari Tabel 3.5.1.4. juga diketahui ruang kelas jenjang SM lebih kecil jika dibandingkan dengan rombongan belajar yang ada, sedangkan jenjang SMP dengan kondisi sebaliknya. Bila satu rombongan belajar harus menggunakan satu ruang kelas maka masih terdapat kekurangan ruang kelas. Kondisi di Sumatera Barat seperti disajikan pada Tabel 3.3, untuk jenjang SD kelebihan 399 ruang kelas, jenjang SMP kelebihan 794 ruang kelas, dan jenjang SM kekurangan 220 ruang kelas, sehingga untuk dikdasmen kelebihan 973 ruang. Terjadinya kekurangan ruang kelas di jenjang SM tersebut hendaknya dipenuhi dalam rangka meningkatkan akses yang merata, sehingga Misi 2 dapat tercapai sesuai dengan Rencana Strategi Kemendikbud 2019. Sebaliknya, jenjang pendidikan SD yang kelebihan ruang kelas tidak dibiarkan kosong dan hendaknya dapat dimanfaatkan oleh semua anak yang belum bersekolah agar bersekolah, sehingga Misi 2 akses yang meluas dapat tercapai sesuai dengan Rencana Strategi Kemendikbud 2019.

Grafik 3.5.1.2. Sumber Daya Manusia Dikdasmen Provinsi Sumatera Barat



Tabel 3.5.1.5. Kekurangan dan kelebihan Prasarana Dikdasmen

Provinsi Sumatera Barat

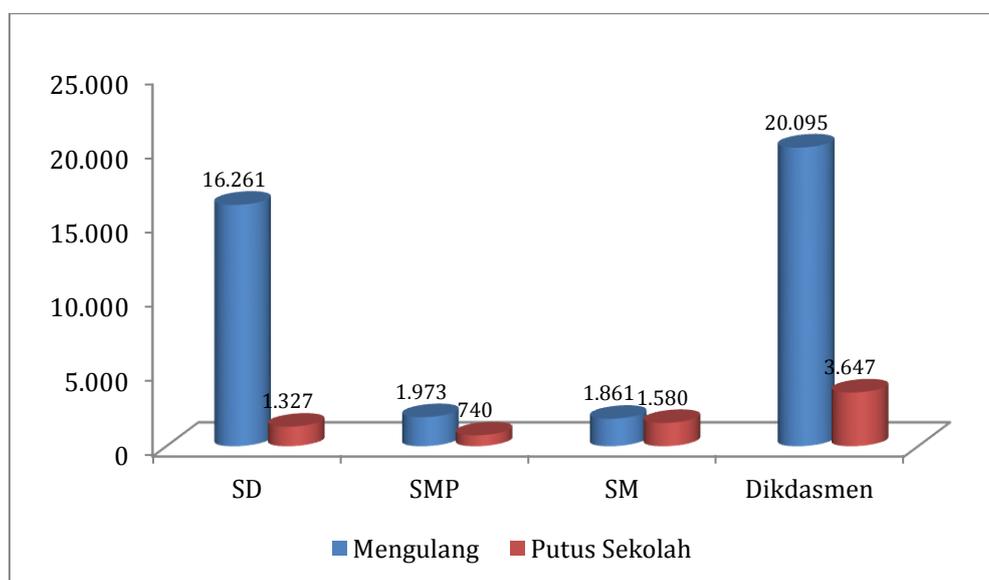
No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Ruang Kelas	(399)	(794)	220	(973)
2	Perpustakaan	1,111	155	221	1,487
3	Ruang UKS	2,736	576	544	3,856
4	Tempat Olahraga	2,792	956	479	4,227
5	Laboratorium	4,401	342	-385	4,358

Hal yang sama untuk perpustakaan, ruang UKS, ruang komputer, tempat olahraga, dan laboratorium. Bila setiap sekolah harus memiliki perpustakaan, ruang UKS, tempat olahraga, dan laboratorium (khusus SM sebanyak 5 jenis laboratorium) maka di semua jenjang pendidikan masih terdapat kekurangan/kelebihan perpustakaan, ruang UKS, tempat olahraga, dan laboratorium. Berdasarkan pada Tabel 3.5.1.5. maka untuk jenjang SD Provinsi Sumatera Barat masih kekurangan 1.111 perpustakaan, jenjang SMP kekurangan 155 perpustakaan, dan jenjang SM kekurangan 221 perpustakaan, sehingga dikdasmen masih kekurangan 10478 perpustakaan. Demikian juga dengan ruang UKS, jenjang SD kekurangan 2.736 ruang UKS, jenjang SMP kekurangan 576 ruang UKS, dan jenjang SM kekurangan 544 ruang UKS, sehingga dikdasmen kekurangan 3.856 ruang UKS. Hal yang sama dengan tempat olahraga, jenjang SD masih kekurangan 2.792 ruang, jenjang SMP masih kekurangan 956 ruang, dan jenjang SM kekurangan 479 ruang, sehingga dikdasmen kekurangan 4.227 ruang. Untuk laboratorium, jenjang SD masih kekurangan 4.401 laboratorium, jenjang SMP masih kekurangan 342 laboratorium dan jenjang SM kelebihan 385 laboratorium sehingga dikdasmen kekurangan 4.358 laboratorium.

Bila dibandingkan antara mengulang dan putus sekolah yang terdapat pada Tabel 3.5.1.4. dan Grafik 3.5.1.3. ternyata di Sumatera Barat mengulang terbesar pada jenjang SD sebesar 16.261 orang sedangkan mengulang terkecil pada jenjang SM sebesar 1.861 orang sehingga jumlah mengulang di dikdasmen menjadi sebesar 20.095 orang. Putus sekolah yang terbesar terdapat pada jenjang SM sebesar 1.580 orang sedangkan putus sekolah terkecil pada jenjang SMP sebesar 740 orang sehingga

jumlah putus sekolah dikdasmen menjadi sebesar 3.647 orang. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan maka mengulang yang besar pada jenjang SD harus segera ditanggulangi melalui program remedial. Hal yang sama untuk putus sekolah yang besar pada jenjang SM hendaknya ditanggulangi melalui program retrieval sehingga anak yang putus sekolah bisa kembali ke sekolah atau dapat masuk di program Paket A/B/C dalam rangka peningkatan mutu di tingkat SD/SMP/SM.

Grafik 3.5.1.3. Mengulang dan Putus Sekolah Dikdasmen Provinsi Sumatera Barat



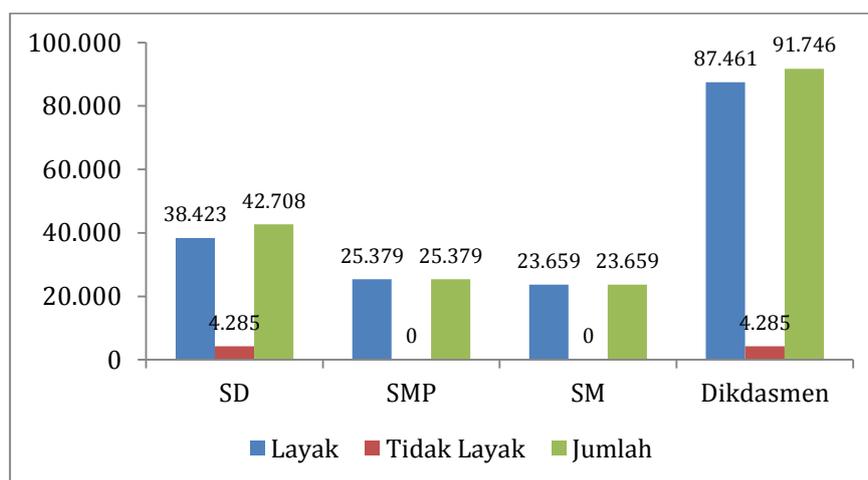
Kelayakan mengajar guru menggunakan Undang-Undang Nomor 14, Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005). Guru layak mengajar di tingkat SD, SMP dan SM adalah yang berijazah Sarjana atau Diploma IV dan yang lebih tinggi. Jumlah guru menurut kelayakan mengajar dapat dilihat pada Tabel 3.5.1.6. dan Grafik 3.5.1.4. Jumlah guru di Sumatera Barat layak mengajar yang terbaik terdapat di jenjang SMP sebesar 25.739 orang, sedangkan guru layak terkecil terdapat di jenjang SM sebesar 23.659 orang. Kecilnya guru layak di jenjang SD karena adanya peningkatan kualifikasi bahwa guru SD yang layak sebelumnya adalah mereka yang memiliki ijazah Diploma II. Sebaliknya, guru yang tidak layak mengajar terbesar di jenjang SD sebesar 4.285 orang. Dengan demikian, untuk dikdasmen terdapat guru layak mengajar sebesar 87.461 orang dan tidak

layak sebesar 4.285 orang. Kondisi ini cukup memprihatinkan, untuk itu diperlukan upaya lebih lanjut dalam rangka penyetaraan guru agar sesuai dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan pada UU No. 14/2005.

Tabel 3.5.1.6. Guru menurut Kelayakan Mengajar Provinsi Sumatera Barat

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Layak	38,423	25,379	23,659	87,461
2	Tidak Layak	4,285	0	0	4,285
	Jumlah	42,708	25,379	23,659	91,746
1	% Layak	89.97	100.00	100.00	95.33
2	% Tidak Layak	10.03	-	-	4.67

Grafik 3.5.1.4. Guru menurut Kelayakan Mengajar Provinsi Sumatera Barat



Tabel 3.5.1.7. Ruang Kelas menurut Kondisi Provinsi Sumatera Barat

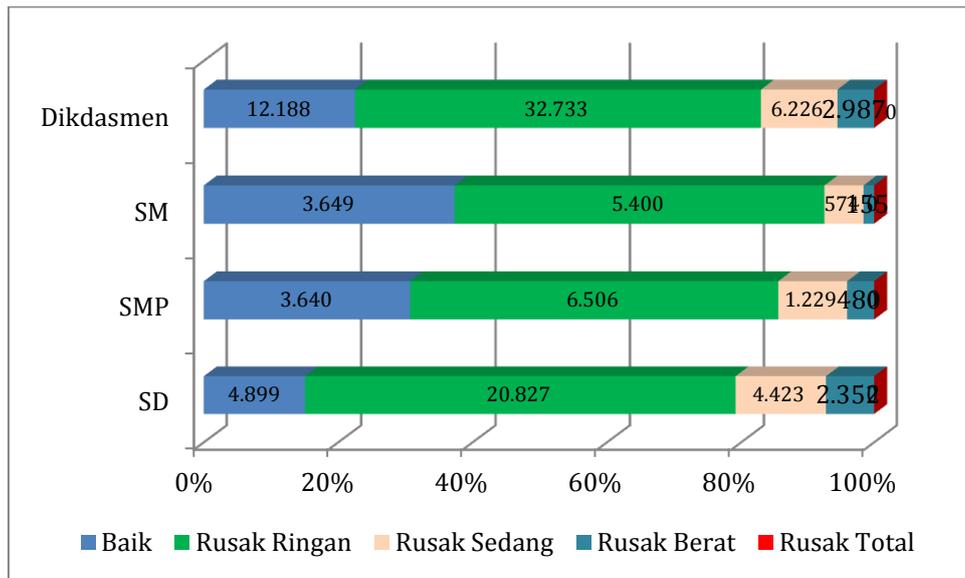
No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Baik	4,899	3,640	3,649	12,188
2	Rusak Ringan	20,827	6,506	5,400	32,733
3	Rusak Sedang	4,423	1,229	574	6,226
4	Rusak Berat	2,352	480	155	2,987
5	Rusak Total	0	0	0	0
	Jumlah	32,501	11,855	9,778	54,134
1	% Baik	15.07	30.70	37.32	22.51
2	% Rusak Ringan	64.08	54.88	55.23	60.47
3	% Rusak Sedang	13.61	10.37	5.87	11.50
3	% Rusak Berat	0.00	0.00	0.00	0.00
5	% Rusak Total	0.00	0.00	0.00	0.00

Ruang kelas sebagai prasarana penting sekolah terbagi dalam lima

kondisi, yaitu baik, rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, dan rusak total. Jumlah ruang kelas menurut kondisi terdapat pada Tabel 3.5.1.7. dan Grafik 3.5.1.5. Berdasarkan ruang kelas di Sumatera Barat, ternyata semua jenjang pendidikan memiliki ruang kelas yang rusak berat. Jumlah ruang kelas baik terbesar di jenjang SD ruang, sedangkan ruang kelas yang baik terkecil di jenjang SMP sebesar 3.640 ruang. Untuk jumlah ruang kelas rusak ringan yang terbesar di jenjang SD sebesar 20.827 ruang, sedangkan ruang kelas rusak ringan yang terkecil di jenjang SM sebesar 5.400 ruang. Jumlah ruang kelas rusak sedang yang terbesar di jenjang SD sebesar 4.423 ruang, sedangkan ruang kelas rusak sedang yang terkecil di jenjang SM sebesar 574 ruang. Jumlah ruang kelas rusak berat yang terbesar di jenjang SD sebesar 2.352 ruang, sedangkan ruang kelas rusak berat yang terkecil di jenjang SM sebesar 155 ruang. Sebaliknya, ruang kelas rusak total tidak ada di semua jenjang.

Jadi, untuk dikdasmen terdapat ruang kelas seluruhnya sebesar 54.134 ruang dengan rincian ruang kelas baik sebesar 12.188 ruang, rusak ringan sebesar 32.733 ruang, rusak sedang sebesar 6.226 ruang, rusak berat sebesar 2.987 ruang, dan rusak total tidak ada. Dengan kondisi seperti ini berarti, sebagian sekolah masih membutuhkan rehabilitasi atau revitalisasi ruang kelas dengan jumlah yang bervariasi. Dengan demikian, dapat dikatakan makin tinggi jenjang pendidikan ternyata makin baik prasarana yang dimiliki. Hal ini dapat dimaklumi karena letak sekolah jenjang SD banyak yang berada di daerah pinggiran dan yang sulit dijangkau.

Grafik 3.5.1.5. Ruang Kelas Menurut Kondisi Provinsi Sumatera Barat

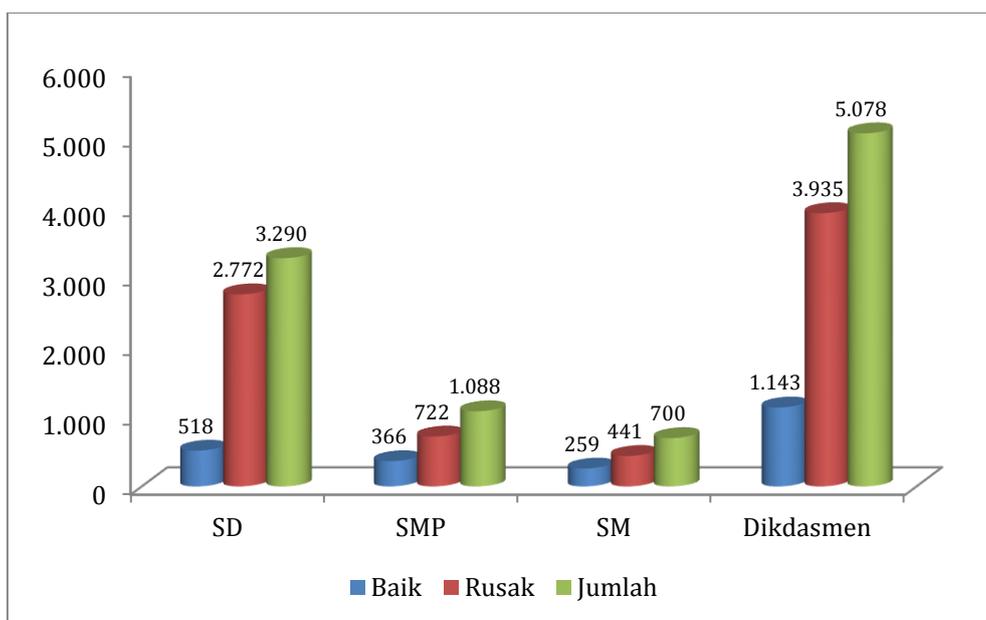


Tabel 3.5.1.8. Perpustakaan menurut Kondisi Provinsi Sumatera Barat

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Baik	518	366	259	1,143
2	Rusak	2,772	722	441	3,935
	Jumlah	3,290	1,088	700	5,078
1	% Baik	15.74	33.64	37.00	22.51
2	% Rusak	84.26	66.36	63.00	77.49

Prasarana sekolah yang juga penting adalah perpustakaan terbagi dalam kondisi baik dan rusak terdapat pada Tabel 3.5.1.8. dan Grafik 3.5.1.6. Berdasarkan perpustakaan di Sumatera Barat, ternyata semua jenjang pendidikan memiliki perpustakaan yang rusak. Jumlah perpustakaan yang baik terkecil di jenjang SM sebesar 37 % atau 259 perpustakaan, sedangkan perpustakaan yang baik terbesar di jenjang SD besar 15.74 % atau 518 perpustakaan. Hal yang sama untuk jumlah perpustakaan yang rusak terbesar di jenjang SD sebesar 84.26 % atau 2.772 Perpustakaan, sedangkan perpustakaan yang rusak terkecil di jenjang SM sebesar 63 % atau 441 perpustakaan.

Grafik 3.5.1.6. Perpustakaan Menurut Kondisi Provinsi Sumatera Barat

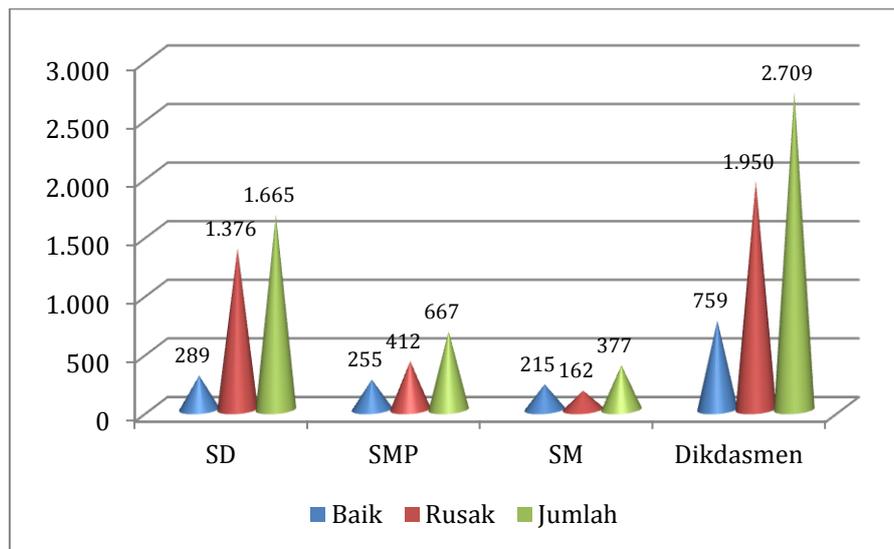


Tabel 3.5.1.9. Ruang Usaha Kesehatan Sekolah menurut Kondisi Provinsi Sumatera Barat

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Baik	289	255	215	759
2	Rusak	1,376	412	162	1,950
	Jumlah	1,665	667	377	2,709
1	% Baik	17.36	38.23	57.03	28.02
2	% Rusak	82.64	61.77	42.97	71.98

Prasarana sekolah yang juga diperlukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23, Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal (Permendikbud 23/2013) adalah ruang UKS juga terbagi dalam kondisi baik dan rusak yang terdapat pada Tabel 3.5.1.9. dan Grafik 3.5.1.7. Berdasarkan ruang UKS di Sumatera Barat, ternyata semua jenjang pendidikan memiliki ruang UKS yang rusak. Jumlah ruang UKS baik terbesar di jenjang SD sebesar 289 ruang, sedangkan ruang UKS baik terkecil di jenjang SM sebesar 215 ruang. Hal yang sama untuk jumlah ruang UKS rusak terbesar di jenjang SD sebesar 1.376 ruang, sedangkan ruang UKS rusak terkecil di jenjang SM sebesar 377 ruang.

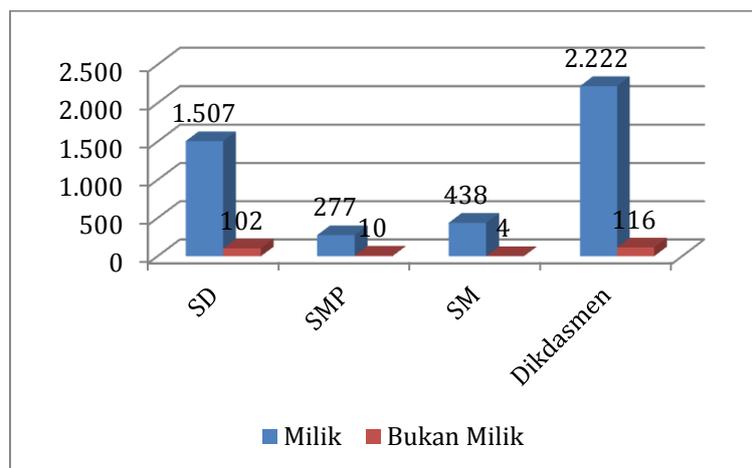
Grafik 3.5.1.7. Ruang UKS Menurut Kondisi Provinsi Sumatera Barat



Tabel 3.5.1.10. Tempat Olahraga Menurut Kepemilikan Provinsi Sumatera Barat

No.	Variabel	SD	SMP	SM	Dikdasmen
1	Milik	1,507	277	438	2,222
2	Bukan Milik	102	10	4	116
	Jumlah	1,609	287	442	2,338
1	% Baik	93.66	96.52	99.10	95.04
2	% Rusak	6.34	3.48	0.90	4.96

Grafik 3.5.1.8. Tempat Olahraga Menurut Kepemilikan Provinsi Sumatera Barat



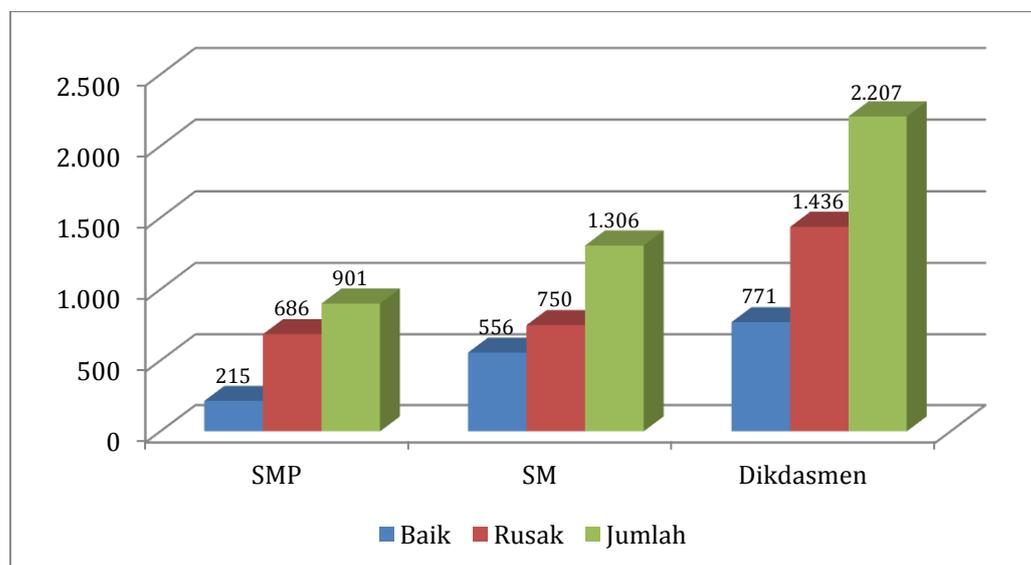
Prasarana sekolah yang juga diperlukan sesuai dengan Permendikbud 23/2013 adalah tempat olahraga menurut kepemilikan

terbagi dalam milik dan bukan milik yang terdapat pada Tabel 3.5.1.10. dan Grafik 3.5.1.8. Berdasarkan tempat olahraga di Sumatera Barat, ternyata semua jenjang pendidikan memiliki tempat olahraga yang bukan milik. Jumlah tempat olahraga milik terbesar di jenjang SD sebesar 1.507 tempat, sedangkan tempat olahraga milik terkecil di jenjang SMP sebesar 277 tempat. Hal yang sama untuk jumlah tempat olahraga bukan milik terbesar di jenjang SD sebesar 102 tempat, sedangkan tempat olahraga bukan milik terkecil di jenjang SM yang rusak sebesar 4 tempat.

Tabel 3.5.1.11. Laboratorium Menurut Kondisi Provinsi Sumatera Barat

No.	Variabel	SMP	SM	Dikdasmen
1	Baik	215	556	771
2	Rusak	686	750	1,436
	Jumlah	901	1,306	2,207
1	% Baik	23.86	42.57	34.93
2	% Rusak	76.14	57.43	65.07

Grafik 3.5.1.9. Laboratorium Menurut Kondisi Provinsi Sumatera Barat



Prasarana sekolah yang juga diperlukan sesuai dengan Permendikbud 23/2013 adalah laboratorium juga terbagi dalam kondisi baik dan rusak terdapat pada Tabel 3.5.1.11. dan Grafik 3.5.1.9. Berdasarkan laboratorium di Sumatera Barat, ternyata semua jenjang pendidikan memiliki laboratorium yang rusak. Jumlah laboratorium baik terkecil di jenjang SMP

sebesar 215 laboratorium, sedangkan laboratorium baik terbesar di jenjang SM sebesar 556 laboratorium. Hal yang sama untuk jumlah laboratorium rusak terbesar di jenjang SM sebesar 750 laboratorium, sedangkan laboratorium rusak terkecil di jenjang SMP sebesar 686 laboratorium.

### 3.5.2 Sasaran Jangka Menengah pada Renstra K/L

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan, diperlukan sejumlah sasaran strategis (SS) yang akan dicapai pada tahun 2024.

1. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan pertama** — Perluasan akses Pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif adalah meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang.
2. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kedua** — Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang.
3. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan ketiga** — Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter adalah menguatnya karakter peserta didik.
4. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan keempat** — Peningkatan peran budaya, bahasa, dan sastra dalam kehidupan berbangsa, adalah Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.
5. Sasaran yang ingin dicapai berkaitan dengan **tujuan kelima** — Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel adalah meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

Kelima sasaran strategis dan kaitannya dengan tujuan pembangunan pendidikan dan kebudayaan terangkum dalam Tabel 3.5.2.1.:

Tabel 3.5.2.1. Sasaran Strategis Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2020-2024

No.	Sasaran Strategis	Tujuan terkait
1.	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang	1
2.	Meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang	2
3.	Menguatnya karakter peserta didik	3
4.	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan	4
5.	Menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	5

### 3.5.3 Sasaran Jangka Menengah dari Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

#### 3.5.3.1 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Transisi 2018	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke-				
						2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat kualitas pendidikan masyarakat	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Meningkatnya Aksesibilitas dan Pemerataan pendidikan	1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	56,81	57	58	59	60	61
				2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD	84,49	85	85,5	86	86,5	87
				3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	83,63	84	84,5	85	85,5	86
				4. Angka Rata-rata Lama Sekolah	10,10	10,60	10,90	11,30	11,60	12,00
			Meningkatnya Mutu Pendidikan	1. Rata - rata nilai Ujian Nasional SMP	51,56	54	56	58	60	62
				2. Jumlah Sekolah Berakreditasi A	27	30	33	36	39	42
2.	Meningkatnya Prestasi Olahraga dan Kepemudaan	Jumlah Medali dan prestasi atlet serta pemuda Kota Pariaman	Meningkatnya Prestasi Olahraga	Jumlah medali yang diperoleh pada even Tk. Provinsi	101	-	110	-	200	-
				Jumlah medali yang diperoleh pada even Tk. Nasional	6	7	7	8	8	9
			Meningkatnya Prestasi Pemuda	Jumlah pemuda berprestasi Tk. Provinsi	2	3	4	4	5	5
				Jumlah pemuda berprestasi Tk. Nasional	2	2	2	2	2	2

Tabel 3.5.3.1. Sasaran Jangka Menengah Pendidikan Kota Pariaman

Sumber data : Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman 2018-2023

### 3.5.3.2 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN /SASARAN	TARGET					KONDISI AKHIR RENSTRA
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya harapan lama sekolah	1 Meningkatkan kualitas layanan pendidikan	1 Persentase satuan pendidikan yang terakreditasi A (memenuhi 8 Standar Pendidikan Nasional)	75%	80%	80%	85%	90%	90%
2	Mewujudkan Bukittinggi sebagai kota Pusaka	2 Meningkatkan kualitas pendidikan	2 APK SD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			3 APK SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			4 APM SD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			5 APM SMP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			6 APK PAUD	86%	86,50%	87,00%	87,50%	88%	88,50%
			7 Rata rata nilai US SD	7,40	8,50	8,54	8,56	8,58	8,59
			8 Rata rata nilai UN SMP	7.00	61.84	61.85	61.86	61.87	61.88
		3 Meningkatkan Pelestarian Warisan Budaya	9 Jumlah prestasi ditingkat Propinsi dan Nasional	200	100	105	112	118	120
			10 Rata rata lama sekolah	10.87	10.87	10.88	10.88	10.90	10.90
			11 Jumlah pelestarian warisan budaya benda	25	27	29	31	33	35
			12 Jumlah pelestarian warisan budaya tak benda	20	22	24	26	28	30
		4 Meningkatkan Apresiasi masyarakat terhadap Warisan Budaya	13 Jumlah Apresiasi Masyarakat terhadap warisan budaya benda	20	22	24	26	28	30
			14 Jumlah Apresiasi Masyarakat terhadap warisan budaya tak benda	20	22	24	26	28	30
		3	Peningkatan kualitas penyelenggaraan Reformasi Birokrasi Disdikbud	5 Peningkatan kualitas penyelenggaraan SAKIP Disdikbud	15 Nilai Sakip Disdikbud		CC	B	A

Tabel 3.5.3.2. Sasaran Jangka Menengah Pendidikan Kota Bukittinggi

Sumber data : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukittinggi 2016-2021

### 3.5.3.3 Dinas Pendidikan Kota Solok

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang Merata	Persentase Sekolah dengan Rata-rata hasil Ujian Nasional (UN) - SD diatas 7.7 - SMP diatas 6 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun) Angka Melek Huruf (AMH) (%)	1. Akses Layanan pendidikan yang merata bagi semua penduduk	1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)						
				- APS Usia 7-12 thn	99,11	99,32	99,43	99,54	99,65	99,99
				- APS Usia 13- 15 thn	97,50	97,55	97,65	97,71	97,81	98,35
				2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	10,78	10,79	10,81	10,82	10,84	10,85
			3. Angka melek huruf	99,20%	99,20%	99,20%	99,20%	99,20%	99,20%	
			2. Kualitas penyelenggara pendidikan yang meningkat	1. Presentase Tenaga pendidik yang sudah sertifikasi	69%	78%	84	93	96	100
				2. Persentase Tenaga pendidik yang memenuhi Kualifikasi Akademis kualifikasi S-1 (%)	94,97 %	99,85%	99,85%	99,9%	99,9%	99,95%
				3. Rasio guru terhadap Murid per kelas rata-rata sekolah dasar						

Tabel 3.5.3.3. Sasaran Jangka Menengah Pendidikan Kota Solok  
Sumber data : Renstra Dinas Pendidikan Kota Solok 2016-2021

### 3.5.3.4 Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Tujuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya pemerataan kualitas daya saing pendidikan	Meningkat dan meratanya kualitas pendidikan dengan SDM yang unggul, berdaya saing dan berkarakter Islami	Rata-rata Lama Sekolah	11,88	12,11	12,33	12,56	12,78
			Harapan Lama Sekolah	15,27	15,38	15,50	15,62	15,74
			Angka melanjutkan SD	100%	100%	100%	100%	100%
			Angka melanjutkan SMP	100%	100%	100%	100%	100%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/Tujuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
			Rata-rata Nilai UN SD	77	77,5	78	78,5	79
			Rata-rata Nilai UN SMP	57	58	60	62	64
2	Meningkatnya Aktivitas Adat dan Budaya di Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman budaya daerah yang diwujudkan dalam karakter dan pelestarian budaya	Pelaku Budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan minimal 4500 orang (7,5% dari total Penduduk Padang Panjang)	2500 orang	3000 orang	3500 orang	4000 orang	4500 orang
			Pelaku Budaya berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan di lembaga adat budaya Kota Padang Panjang	100 orang	150 orang	200 orang	250 orang	300 orang
3	Meningkatnya angka melanjutkan siswa miskin ke perguruan tinggi	Meningkatnya angka melanjutkan siswa miskin ke perguruan tinggi	Menurunnya Angka Kemiskinan	5.45	5.03	4.6	4.18	3.75
			Indeks GINI	0,28	0,27	0,26	0,25	0,24
			Angka melanjutkan siswa miskin ke perguruan tinggi	0,05	0,07	0,10	0,12	0,15

Tabel 3.5.3.4. Sasaran Jangka Menengah Pendidikan Kota Padang Panjang

Sumber data : Renstra Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang 2018-2023

### 3.5.3.5 Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Harapan Lama sekolah	Angka Lama Sekolah	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Kota Payakumbuh	1. Jumlah Satuan Pendidikan yang terakreditasi (memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan)							

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Kinerja pada awal RPJMD (Tahun 2016)	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke-					
						2017	2018	2019	2020	2021	2022
				a. SD/SMP Trakreditasi A	64	67	70	74	77	80	82
				b. PAUD dan Dikmas Terakreditasi A	3	4	5	7	9	11	12
				2. APM dan APK							
				a. APK PAUD	NA	75	75	75,70	75,90	76,10	76,30
				b. APK SD/MI/Paket A	114	114,31	121,66	125,05	127,50	130,10	132,75
				c. APK AMP/MTs/Paket B	141	141,05	121,66	125,05	127,50	130,10	132,75
				d. APM SD/MI/Paket A	100,80	100,80	108,39	109,75	110,50	112,05	113,80
				e. APM SMP/MTs/Paket B	109,94	109,94	119,30	120,15	121,30	122,10	124,15
			Meningkatnya Kualitas Pendidikan Kota Payakumbuh	1. Rata-rata Nilai :							
				a. US SD	7,60	7,60	7,65	7,70	7,75	7,80	7,90
				b. UN SMP	5,37	5,75	5,80	5,85	5,90	6,00	6,10
				2. Jumlah prestasi siswa ditingkat propinsi dan nasional:							
				a. Propinsi	12	15	15	16	16	17	18
				b. Nasional	2	2	2	2	3	3	4
				3. Rata-rata Lama Sekolah	10,30	10,40	10,50	10,60	10,70	10,80	10,90
				4. Persentase sekolah dengan pendidikan karakter berkategori baik	5,31	13,83	21,28	28,72	36,17	43,62	51,06
				5. Angka Harapan Lama Sekolah	14,22	14,31	14,40	14,49	14,58	14,67	14,77
				6. Angka kelulusan	100	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Penilaian AKIP Dinas Pendidikan oleh Inspektorat	B	BB	BB	A	A	A	A

Tabel 3.5.3.5. Sasaran Jangka Menengah Pendidikan Kota Payakumbuh  
Sumber data : Renstra Dinas Pendidikan Kota Payakumbuh 2017-2022

### 3.5.3.6 Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tujuan (Tahun Akhir Rentsra)	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Meningkatnya akses dan kualitas layanan pendidikan	1. Rata - rata lama sekolah	8,2 tahun	Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan	APK PAUD	45,29	45,38	45,47	45,56	45,65	45,75
					APK SD	124,22	124,2	124,18	124,16	124,14	124,12
					APK SMP	101,61	102,32	103,04	103,76	104,49	105,77
					APM SD	99,22	99,38	99,51	99,64	99,81	99,9
					APM SMP	89,9	89,9	90,08	90,17	90,26	90,72
					Angka Putus Sekolah	0,12	0,11	0,1	0,09	0,08	0,07
		2. Harapan Lama Sekolah	13,2 tahun	Meningkatnya kualitas Pendidikan	Persentase Sekolah dengan Akreditasi Minimal B	55	60	65	70	75	80
					Rata- rata nilai UN	6,5	6,55	6,6	6,65	6,7	6,75
2	Meningkatnya pengembangan Seni dan Budaya	1. Persentase cakupan seni dan budaya	55%	Meningkatnya jumlah seni budaya lokal yang dilestarikan	Persen tase jumlah seni budaya yang dilestarikan	25	30	35	40	45	50
					Persentase benda cagar budaya yang dilestarikan	35	40	45	50	55	60

Tabel 3.5.3.6. Sasaran Jangka Menengah Pendidikan Kab. Pesisir Selatan  
Sumber data : Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan 2016-2021

### 3.5.3.7 Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun				
					2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Pengembangan Adat dan Budaya	Persentase Peningkatan Pengembangan adat dan budaya	Meningkatnya pengembangan Kesenian dan Kebudayaan	Jumlah event kesenian dan kebudayaan yang diikuti	4	5	5	5	6
				Jumlah kelompok Kesenian dan Kebudayaan yang aktif	70	72	74	75	75

			Meningkatnya Pelestarian Cagar Budaya	Jumlah Benda Cagar Budaya yang Terdata	70	72	74	75	75
				Persentase Benda/Situs yang dilestarikan	60	72	74	75	75
				Persentase Budaya Lokal yang dikembangkan	55%	65%	75%	85%	95%
2	Meningkatkan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Persentase Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Paud dan Non Formal	Angka Partisipasi PAUD	70	72	74	75	75
				Angka Melek Huruf	95	95.08	95.12	95.25	95.50
			Meningkatkan Kualitas Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Kasar Dikdas	98	98.05	95.12	98.25	98.75
				Angka Partisipasi Murni Dikdas	95	95.05	95.12	95.25	95.50
				Angka Harapan Lama Sekolah	8	8.2	8.15	8.25	8.50
				Jumlah Lembaga Pendidikan yang terakreditasi A	39	44	79	94	111
				Rangking-rangking rata-rata nilai UN	9	8	7	6	5
			Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pendidikan	Angka melanjutkan	70	75	80	85	90
				Persentase Guru yang Bersertifikasi	85	85	85.12	85.25	85.75
				Persentase Guru yang Berkualifikasi	88	89	89.25	89.75	90
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Akuntabilitas	5	5	5	5	5

### 3.5.4 Implikasi RTRW bagi Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) bagi pelayanan Dinas Pendidikan, Provinsi Sumatera Barat melalui peningkatan aksesibilitas pendidikan dan Kesempatan memperoleh pendidikan non-diskriminatif bagi semua dengan pelaksanaan sistem zonasi pada proses penerimaan siswa baru, sehingga semua anak dapat mendapatkan pendidikan tanpa melihat status social, ekonomi dan budaya. Sistem zonasi dimaksudkan untuk membuka kesempatan bagi semua anak dalam mendapatkan pendidikan

dan menghilangkan sistem favoritism atau pelabelan terhadap sekolah tertentu. Pendidikan diberikan seluas-luasnya tanpa memandang SARA maupun kondisi tertentu yang berupa kebutuhan khusus, pendidikan diberikan pada semua karena pendidikan adalah hak dasar bagi rakyat Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945.

Relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI) dengan melakukan penguatan pendidikan vokasi untuk penyiapan tenaga kerja siap pakai namun berketrampilan sehingga dapat terserap dalam industry kerja, baik untuk menunjang perubahan dalam pembangunan daerah yang akan membutuhkan tenaga kerja banyak maupun untuk kepentingan siswa sehingga memiliki nilai plus dibandingkan lulusan dari luar Sumatera Barat.

Melalui program unggulannya Gubernur Sumatera Barat untuk periode 2021-2026 mencanangkan program Sumbar sehat dan cerdas melalui 8 program, namun hal yang berhubungan dengan Pendidikan yaitu:

1. Menyediakan sanitasi layak di sekolah dan fasilitas umum lainnya serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendukung Adaptasi Kebiasaan Baru.
2. Tunjangan khusus sebesar 2,5 juta untuk Guru dan Tenaga Kependidikan SMA/SMK/SLB di daerah 3T (Terdepan, Terluar & Tertinggal)
3. Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen.
4. Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses pendidikan.
5. Seribu beasiswa kuliah di PerguruanTinggi terbaik di dalam dan luar negeri.

Dalam rangka penyediaan sanitasi layak di sekolah dipersiapkan WC dan jaringan sanitasi yang layak dan sehat untuk sekolah. Membangun SMA/SMK baru berdasarkan potensi daerah dan Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) untuk pemerataan akses Pendidikan didasarkan

pada Kajian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

### 3.5.5 Implikasi KLHS bagi Pelayanan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) bagi pelayanan Dinas Pendidikan, provinsi Sumatera Barat maka hal tersebut dapat dikaitkan dengan peningkatan kapasitas dan optimalisasi lingkungan hidup strategis bagi peningkatan program keahlian di SMK berupa program vokasi sesuai dengan lingkungan sekitar. SMK Kelautan untuk mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan sarana prasarana baik yang bersifat fisik bangunan maupun fisik bahan ajar/percontohan, peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dengan mengirim untuk mengikuti diklat yang bersifat daerah, nasional dan internasional, penyelenggaraan program magang dengan dunia usaha dunia industri bagi peserta didik untuk meningkatkan kompetensi dan life skill lulusan, dan juga sertifikasi keahlian baik bagi pendidik dan tenaga kependidikan dan lulusan program keahlian. Peningkatan program keahlian di SMK Seni dan Budaya untuk mendukung pembangunan daerah melalui penyediaan fasilitas berupa sarana prasarana fisik bangunan berupa panggung, teater maupun fasilitas fisik pendukung berupa alat music, gamelan, busana tari dll, mengirimkan pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengikuti diklat seni dan budaya baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional dan juga pengiriman/pertukaran pelajar di bidang seni dan budaya baik tingkat nasional maupun internasional.

Peningkatan program keahlian di SMK Pariwisata untuk mendukung pembangunan daerah melalui Peningkatan kerjasama dengan dunia pariwisata khususnya perhotelan melalui program magang bagi peserta didik, peningkatan kualitas dan mutu pendidik dan tenaga kependidikan untuk memperoleh sertifikasi yang menunjang di bidang pariwisata dan peningkatan program keahlian melalui kegiatan dan pengadaan unit usaha di bidang perhotelan dan pariwisata.

Peningkatan program keahlian industri kreatif untuk meningkatkan perekonomian dan pariwisata melalui penyediaan sarana prasarana fasilitas penunjang untuk meningkatkan ketrampilan di dunia kreatif, baik yang berupa alat perlengkapan maupun bahan percontohan, peningkatan kerjasama antara dunia pariwisata dengan membuka pangsa pasar untuk memasarkan hasil kreasi industry kreatif sebagai cinderamata atau souvenir, peningkatan kemampuan dan ketrampilan pendidik dan tenaga kependidikan melalui diklat tingkat daerah, nasional maupun internasional, dan sertifikasi bagi pendidik dan tenaga kependidikan agar mampu menciptakan lulusan yang berkemampuan dan terampil.

Peningkatan program keahlian industri otomotif dan permesinan melalui penyediaan sarana prasarana berupa fasilitas tempat dan peralatan dan bahan praktek, standar keahlian bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan tersandar, peningkatan ketrampilan dan kemampuan melalui diklat tingkat daerah, nasional maupun internasional bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dan kerjasama dengan dunia usaha dunia industri melalui program magang bagi peserta didik.

Peningkatan program keahlian bidang energi terbarukan melalui penyediaan sarana prasarana berupa fasilitas tempat dan peralatan dan bahan praktek, standar keahlian bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui sertifikasi sehingga menghasilkan lulusan yang berkualitas dan tersandar, peningkatan ketrampilan dan kemampuan melalui diklat tingkat daerah, nasional maupun internasional bagi pendidik dan tenaga kependidikan, dan kerjasama dengan dunia usaha dunia industri melalui program magang bagi peserta didik.

Peningkatan program pelatihan dan pendampingan bagi pendidik dan tenaga kependidikan melalui penyediaan kegiatan untuk peningkatan kemampuan dan kapasitas guru dalam penggunaan teknologi informasi sebagai media dan metode pembelajaran baru.

Peningkatan sarana prasarana berupa pembangunan dan pemeliharaan jaringan internet, bandwidth dan sarana pendukung lainnya sehingga sekolah bisa menggunakan dan memanfaatkan untuk

pembelajaran jarak jauh baik selama masa pandemic covid-19 maupun sesudah pandemic sebagai upaya peningkatan mutu dan kualitas pendidikan Sumatera Barat.

Peningkatan mutu dan kualitas sarana pendukung olahraga melalui penyediaan sarana olahraga publik bagi masyarakat, dan peningkatan kualitas sarana olahraga dengan penyediaan sarana olahraga yang memenuhi standar pelayanan internasional sehingga memudahkan pemanfaatan dan penggunaan pada saat kompetisi olahraga. Penyediaan akses public atas sarana olahraga bagi masyarakat untuk meningkatkan pola hidup sehat gemar olahraga, dan Penyediaan sarana umum seperti toilet, shower dan mushola yang dapat digunakan baik oleh atlet yang bertanding maupun berlatih, dan masyarakat sebagai pengguna umum.

Serta penumbuhan kewirausahaan dan kemandirian pemuda melalui Pembentukan kelompok pemuda sebagai model akan terwujudnya kemandirian dan kewirausahaan yang dilakukan mulai dari pelatihan, pendampingan dan bantuan usaha namun dengan tetap dilakukan evaluasi terkait trial dan error selama pelaksanaan sehingga dapat dijadikan model bagi kelompok pemuda lainnya. Pendampingan terhadap sentra pemuda yang sudah pernah mendapatkan pelatihan sehingga didapatkan tolak ukur dan evaluasi atas capaian yang sudah dicapai baik berupa keberhasilan maupun kegagalan. Serta membuka kesempatan kerjasama dengan dunia industry kreatif dan pariwisata dengan membentuk jaringan kerja antara sentra pemuda dengan berdasar spesifikasi/kekhususan produk yang dihasilkan sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.

### **Isu Strategis**

Dari permasalahan-permasalahan yang ditinjau dari aspek pendorong dan penghambat maka dapat disimpulkan isu strategis yaitu : meningkatkan partisipasi pendidikan pada jenjang Pendidikan Menengah yang menjadi kewenangan Provinsi dipengaruhi oleh kebijakan daerah dalam manajemen pendidikan persekolahan pada jenjang Pendidikan Dasar sehingga membutuhkan koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah

daerah dalam meningkatkan partisipasi penduduk dan rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah di masa yang akan datang.

Arah kebijakan dan strategi bidang pendidikan mengacu konsep merdeka belajar yang menghadirkan pendidikan bermutu tinggi yang dicirikan oleh angka partisipasi yang tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan. Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga pendidikan, DU/DI, dan masyarakat.

Meningkatnya kebutuhan lulusan pendidikan menengah yang terampil dalam memenuhi kebutuhan dunia kerja, termasuk kesesuaiannya dengan kebutuhan di daerah membutuhkan pendirian SMK yang relevan dengan kebutuhan daerah dan dunia kerja. Persoalan yang perlu diantisipasi berkaitan dengan pendirian SMA/SMK berhadapan dengan penentuan pemilihan lokasi.

Isu penting dalam bidang pendidikan yaitu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan (ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru), peningkatan kuantitas, kualitas serta distribusi guru dan tenaga kependidikan, peningkatan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi siswa untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang tersebar luas di daerah.

**BAB IV**  
**TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bab ini dikemukakan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi perangkat daerah pendidikan Sumatera Barat. Tujuan yang dirumuskan tentunya telah diturunkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Setiap tujuan yang dirumuskan pula sasaran yang hendak dicapai dan indikator tujuan dan sasaran, serta target kinerja sesuai dengan tujuan berdasarkan tahun perencanaan.

**4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat**

Untuk menunjang pencapaian Visi dan Misi Gubernur yang sudah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta mempedomani Tujuan dan Sasaran RPJMD maka tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pendidikan provinsi Sumatera Barat beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1.1. sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan  
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, unggul, dan berdaya saing.	1. Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	%	14,05	14,06	14,08	14,09	14,10
			Rata-rata Lama Sekolah	%	9,18	9,28	9,38	9,47	9,57
2	Terwujudnya kualitas perencanaan Pendidikan berbasis data valid dan terintegrasi.	2. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72
3	Meningkatnya pemenuhan								

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	sarana dan prasarana Pendidikan menengah, kejuruan dan Pendidikan khusus. Meningkatkan akses layanan pendidikan menengah, khusus dan inklusif untuk seluruh penduduk usia sekolah.	khusus	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	53,80	54,72	55,65	56,57	57,50
			Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	%	93,22	94,70	96,20	97,70	99,20
5	Terwujudnya satuan pendidikan yang memenuhi standar sekolah sehat.								
6	Meningkatnya kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi dan karakter siswa	3. Meningkatkan kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Persentase SMA Negeri terakreditasi	%	87,46	89,47	91,48	93,49	95,50
			Persentase SMK Negeri terakreditasi	%	85,02	86,70	88,38	90,07	91,75
			Persentase SLB Negeri terakreditasi	%	53,38	55,03	56,69	58,34	60,00
			Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	58,2	58,51	58,82	59,13	59,45
7	Meningkatnya daya saing lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri		Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang	%	27,4	27,70	28,01	28,32	28,63

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			memenuhi kompetensi minimum						
			Rasio guru terhadap murid pada SMA	%	14,04	14,54	15,05	15,55	16,06
			Rasio guru terhadap murid pada SMK	%	12,57	12,95	13,32	13,69	14,07
			Rasio guru terhadap murid pada SLB	%	5,27	5,49	5,72	5,95	6,17
		4. Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah	%	31,5	32	34	35	40
			Persentase lulusan pendidikan menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi	%	37	37,5	38	39	40
			Persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri	%	49,33	52,17	53,40	55,22	56
			Jumlah SMK yang terevitalisasi	Unit	3	6	9	12	16

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	5. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase Kualifikasi guru SMA pendidikan minimal S1/D4	%	99,30	99,53	99,77	99,91	100
			Persentase Kualifikasi guru SMK pendidikan minimal S1/D4	%	99,03	99,28	99,51	99,77	100
			Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri	%	50	55	56	60	65
			Persentase Kualifikasi guru SLB pendidikan minimal S1/D4	%	93,76	95,32	96,88	98,44	100
			Persentase Guru SMA yang bersertifikasi	%	79,73	84,80	89,86	94,93	100
			Persentase Guru SMK yang bersertifikasi	%	79,97	84,99	89,98	95,00	100
			Persentase Guru SLB yang bersertifikasi	%	76,85	82,64	88,42	94,21	100
			Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan SMA pendidikan minimal S1/D4	%	80,60	85,47	90,26	95,13	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
			Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan SMK pendidikan minimal S1/D4	%	78,76	84,03	89,46	94,73	100
			Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan SLB pendidikan minimal S1/D4	%	88,00	92,00	94,00	98,00	100

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian bab ini dikemukakan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan Sumatera Barat dengan menelusuri faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pembangunan pendidikan selama ini, sehingga ditemukan strategi yang tepat menentukan arah kebijakan pembangunan pendidikan dalam periode lima tahun ke depan.

Penyusunan rencana pembangunan pendidikan tentunya untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mempunyai kekuatan atau keunggulan yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Kekuatan atau keunggulan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Tersedianya lembaga layanan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang terakreditasi A dan B
- b. Tersedianya tenaga pendidik dengan kualifikasi  $\geq$  S1 96,68%
- c. Lulusan SMA/SMK 99,85%
- d. Kepedulian masyarakat terhadap pendidikan yang masih tinggi
- e. Budaya ABS-SBK (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) sebagai jati diri masyarakat Sumatera Barat.

Dibalik kekuatan dan peluang, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mempunyai gangguan yang bisa menghambat terwujudnya visi dan misi tersebut. Adapun gangguan atau kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah distribusi guru yang belum merata secara spatial (3T) dan pusat pertumbuhan;
- b. Lulusan yang diterima di perguruan tinggi dan dunia kerja masih rendah;
- c. Belum terpenuhinya standar minimal sarana prasarana pendidikan;
- d. Belum seimbangny jumlah guru dengan kebutuhan; dan

- e. Belum optimalnya penerapan IPTEK.

Disamping adanya gangguan atau kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, ada beberapa tantangan atau ancaman dari luar yang menyulitkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, yakni:

- a. Berlakunya pasar bebas ASEAN yang belum siap untuk dihadapi;
- b. Pesatnya peningkatan kualitas pendidikan provinsi tetangga;
- c. Meningkatnya pengaruh narkoba dan pergaulan bebas; dan
- d. Isorientasi penggunaan teknologi informasi.

Untuk mengatasi tantangan atau ancaman tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat juga mempunyai peluang untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, sehingga upaya-upaya yang telah dirumuskan dan direncanakan akan tercapai. Peluang-peluang tersebut adalah:

- a. Inpres No: 9 Tahun 2016 tentang revitalisasi SMK;
- b. Pengadaan guru garis depan bagi daerah 3T;
- c. Peluang kerjasama dengan asosiasi dan lembaga yang bergerak di bidang pendidikan; dan
- d. Adanya Lembaga sertifikasi keahlian lulusan SMK. Terbukanya peluang bagi tamatan SMK untuk mendapatkan sertifikasi keahlian.

Langkah pertama adalah merumuskan faktor strategis internal peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat. Faktor strategi internal yang mendorong kepada peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional dapat dilihat dari dua faktor yakni kekuatan dan kelemahan. Adapun faktor internal dari kekuatan peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat itu adalah 1) Keberadaan lembaga pendidikan menengah yang memadai, 2) Sistem manajemen sekolah yang sudah berjalan, 3) Infrastruktur sekolah yang sudah ada, 4) Kesehatan organisasi sekolah. Sedangkan faktor internal yang merupakan kelemahan dalam peningkatan daya saing pendidikan

Sumatera Barat di level regional adalah: 1) Kondisi system informasi teknologi pembelajaran belum memadai, 2) Kecukupan kompetensi dan pelatihan guru rendah, 3) Lingkungan sekolah yang kurang menyenangkan karena cenderung dengan mudah disusupi paham radikalisme, 4) Inovasi layanan pendidikan yang membentuk karakter rendah.

Pada sisi lain faktor strategis eksternal yang mempengaruhi peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat ke depan itu dari faktor peluang adalah: 1) Adanya Sistem peningkatan kelayakan sekolah yang mendorong kepada sekolah bermutu, 2) Penilaian sekolah berprestasi nasional, 3) Kerjasama sekolah dengan mitra pendidikan LN, 4) Adanya lembaga sertifikasi guru dan sekolah nasional. Sedangkan factor strategi sektoral berupa ancaman terhadap pencapaian daya saing pendidikan Sumatera Barat kedepan itu adalah: 1) Mudahnnya masuk informasi teknologi kelingkungan sekolah secara bebas, 2) Promosi sekolah unggul oleh lembaga pendidikan provinsi tetangga, 3) Standarisasi sekolah nasional dan internasional, 4) Kecenderungan akan terjadinya integrasi bangsa dan masuknya paham ekstrim melalui sumber-sumber belajar di sekolah.

Berdasarkan kepada faktor strategis internal dan eksternal dalam peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat diatas, kemudian dapat dirumuskan strategis peningkatan daya saing pendidikan Sumatera Barat di level regional. Strategi ini tentunya akan memayungi program dan kegiatan dalam peningkatan daya saing di level regional dalam lima tahun ke depan. Pada tabel 5.1.1. dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2021-2026 berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 5.1.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	: Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan		
Misi	: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya saing		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Terwujudnya Kualitas perencanaan pendidikan berbasis data valid dan terintegrasi 2. Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prsarana Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Pendidikan Khusus 3. Meningkatnya akses layanan pendidikan menengah, khusus dan inklusif untuk seluruh penduduk usia sekolah 4. Terwujudnya satuan pendidikan yang memenuhi standar sekolah sehat	1. Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus	1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	1. Memprioritaskan pemenuhan SPM bidang pendidikan 2. Menjamin siswa tidak mampu diterima di SMA/SMK Negeri minimal 20 Persen
		2. Pelaksanaan Pengendalian perizinan Pendidikan	1. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan pendidikan menengah dan dan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat 2. Melaksanakan pembinaan Pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat
		3. Optimalisasi Pengelolaan Pendidikan dalam rangka meningkatkan kualitas untuk pemerataan pendidikan	1. Melaksanakan pembangunan unit sekolah baru SMA dan SMK 2. Melaksanakan penambahan ruang kelas baru SMA dan SMK 3. Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan SMA, dan SMK 4. Mengembangkan karir pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan khusus 5. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas sekolah SMA dan SMK 6. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana dan utilitas

			<p>sekolah pendidikan khusus (SLB)</p> <p>7. Pembangunan sekolah baru di zona perbatasan</p> <p>8. Revitalisasi SMK sesuai potensi daerah dan kebutuhan pasar kerja</p> <p>Penguatan karakter melalui pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa</p> <p>9. Meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan terutama yang berada pada daerah 3T secara bertahap</p> <p>10. Seribu beasiswa kuliah di Perguruan Tinggi terbaik di dalam dan luar negeri</p>
<p>5. Meningkatnya kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi dan karakter siswa</p> <p>6. Meningkatnya daya saingan lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri</p>	<p>2. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah dan pendidikan khusus</p> <p>3. Meningkatnya relevansi pendidikan menengah dan pendidikan khusus</p>	<p>4. Pengembangan Kurikulum berbasis kearifan lokal</p>	<p>1. Penguatan pendidikan karakter kepada siswa yang berbasis nilai-nilai keagamaan, kebangsaan dan kebudayaan Minangkabau di sekolah</p> <p>2. Mendorong Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus</p>
		<p>5. Penguatan Pengembangan bahasa dan sastra</p>	<p>1. Melakukan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra daerah</p>
<p>7. Meningkatnya Kuantitas, Kualitas dan distribusi guru dan tenaga kependidikan</p>	<p>4. Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan</p>	<p>6. Peningkatan pemetaan dan penataan pendidik dan tenaga kependidikan</p>	<p>1. Melaksanakan Perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota</p> <p>2. Melaksanakan Penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan lintas kabupaten/kota</p> <p>3. Peningkatan kualitas kompetensi guru</p>

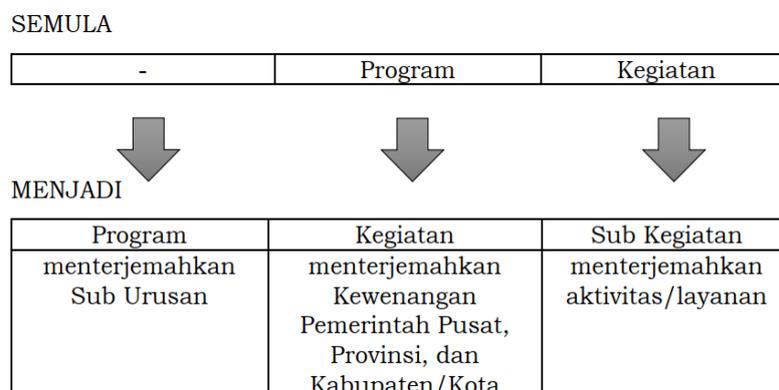
## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Melalui pendekatan kinerja, pemerintah daerah fokus pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi.

Sesuai dengan Permendagri 90 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Menjelaskan bahwa **program** disusun dengan memperhatikan sub bidang urusan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lampiran I tentang matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. **Kegiatan** mengacu pada program dengan memperhatikan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. **Sub Kegiatan** merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Maka, perubahan komposisi klasifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan menjadi sebagai berikut:



Gambar 6.1. Perubahan Komposisi Klasifikasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2019 menjelaskan Bidang Pendidikan dapat menggunakan 6 Program dalam pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  
Terdiri dari beberapa kegiatan diantara lain :
  - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan
  - c. Administrasi Umum
  - d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program Pengelolaan Pendidikan  
Terdiri dari 3 (tiga) kegiatan antara lain:
  - a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
  - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
  - c. Pengelolaan Pendidikan Khusus
3. Program Pengembangan Kurikulum  
Terdiri dari 2 (dua) kegiatan antara lain:
  - a. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah
  - b. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus
4. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan  
Terdiri dari 1 (satu) kegiatan antara lain:
  - a. Pemindehan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi
5. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan  
Terdiri dari 2 (dua) Kegiatan antara lain:
  - a. Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
  - b. Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
6. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra  
Terdiri dari 1 (satu) Kegiatan antara lain:
  - a. Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

Tabel 6.1  
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan  
Provinsi Sumatera Barat

Tujuan	Sasaran	Kode Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
<b>DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA BARAT</b>						<b>595.886.326.000</b>		<b>603.484.038.000</b>		<b>618.316.197.000</b>		<b>640.187.460.000</b>		<b>670.853.206.000</b>					
1. Terwujudnya Kualitas perencanaan pendidikan berbasis data valid dan terintegrasi	1. Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan bermutu pada jenjang pendidikan menengah, dan pendidikan khusus	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah	93,22	576.228.359.350	94,7	583.575.428.410	96,2	597.918.282.000	97,7	619.068.023.290	99,2	648.722.123.180			Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat	
				APM Pendidikan Menengah	73,42		73,49		73,56		73,65		73,72						
				APK SLB	53,8		54,72		55,65		56,57		57,5						
2. Meningkatkan Pemenuhan Sarana dan Prsarana Pendidikan Menengah, Kejuruan dan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas		328.450.164.830		332.637.994.194		340.813.420.740		352.868.773.275		369.771.610.213						
			1.01.02.1.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Terbangunnya Penambahan Ruang Kelas Baru	20 Sekolah	6.569.003.297	21 Sekolah	6.652.759.884	22 Sekolah	6.816.268.415	23 Sekolah	7.057.375.466	24 Sekolah	7.395.432.204				
3. Meningkatkan akses layanan pendidikan menengah, khusus dan inklusif untuk seluruh penduduk usia sekolah	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terbangunnya Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	6 Sekolah	1.018.195.511	7 Sekolah	1.031.177.782	8 Sekolah	1.056.521.604	9 Sekolah	1.093.893.197	10 Sekolah	1.146.291.992					
			1.01.02.1.01.07	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Terbangunnya Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	8 Sekolah	1.313.800.659	9 Sekolah	1.330.551.977	10 Sekolah	1.363.253.683	11 Sekolah	1.411.475.093	12 Sekolah	1.479.086.441				
4. Terwujudnya satuan pendidikan yang memenuhi standar sekolah sehat	1.01.02.1.01	1.01.02.1.01	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	Terbangunnya Pembangunan Ruang Laboratorium IPA	11 Sekolah	2.397.686.203	12 Sekolah	2.428.257.358		2.487.937.971	14 Sekolah	2.575.942.045	15 Sekolah	2.699.332.755					
			1.01.02.1.01.10	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Terbangunnya Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	4 Sekolah	689.745.346	5 Sekolah	698.539.788	6 Sekolah	715.708.184	7 Sekolah	741.024.424	8 Sekolah	776.520.381				
			1.01.02.1.01.11	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terbangunnya Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2 Sekolah	197.070.099	3 Sekolah	199.582.797	4 Sekolah	204.488.052	5 Sekolah	211.721.264	6 Sekolah	221.862.966				
			1.01.02.1.01.12	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Terbangunnya Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	7 Sekolah	3.941.401.978	8 Sekolah	3.991.655.930	9 Sekolah	4.089.761.049	10 Sekolah	4.234.425.279	11 Sekolah	4.437.259.323				
			1.01.02.1.01.14	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	180 Sekolah	40.300.835.225	181 Sekolah	40.814.681.888	182 Sekolah	41.817.806.725	183 Sekolah	43.296.998.481	184 Sekolah	45.370.976.573				
			1.01.02.1.01.15	Pembangunan Fasilitas Parkir	Terbangunnya Pembangunan Fasilitas Parkir	5 Sekolah	624.055.313	6 Sekolah	632.012.189	7 Sekolah	647.545.499	8 Sekolah	670.450.669	9 Sekolah	702.566.059				
			1.01.02.1.01.16	Pembangunan Kantin Sekolah	Terbangunnya Pembangunan Kantin Sekolah	4 Sekolah	459.830.231	5 Sekolah	465.693.192	6 Sekolah	477.138.789	7 Sekolah	494.016.283	8 Sekolah	517.680.254				
			1.01.02.1.01.19	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Terehabnya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	15 Sekolah	2.791.826.401	16 Sekolah	2.827.422.951	17 Sekolah	2.896.914.076	18 Sekolah	2.999.384.573	19 Sekolah	3.143.058.687				
			1.01.02.1.01.24	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	Terehabnya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer	3 Sekolah	262.760.132	4 Sekolah	266.110.395	5 Sekolah	272.650.737	6 Sekolah	282.295.019	7 Sekolah	295.817.288				
			1.01.02.1.01.29	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Terehabnya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	2 Sekolah	886.815.445	3 Sekolah	898.122.584	4 Sekolah	920.196.236	5 Sekolah	952.745.688	6 Sekolah	998.383.348				
			1.01.02.1.01.31	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terehabnya Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12 Sekolah	2.036.391.022	13 Sekolah	2.062.355.564	14 Sekolah	2.113.043.209	15 Sekolah	2.187.786.394	16 Sekolah	2.292.583.983				
			1.01.02.1.01.34	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Terehabnya Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	2 Sekolah	262.760.132	3 Sekolah	266.110.395	4 Sekolah	272.650.737	5 Sekolah	282.295.019	6 Sekolah	295.817.288				
			1.01.02.1.01.36	Pengadaan Mebel Sekolah	Tersedianya Pengadaan Mebel Sekolah	21 Sekolah	4.368.387.192	22 Sekolah	4.424.085.323	23 Sekolah	4.532.818.496	24 Sekolah	4.693.154.685	25 Sekolah	4.917.962.416				
			1.01.02.1.01.41	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	Tersedianya Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Peserta Didik	26 Sekolah	36.687.883.411	27 Sekolah	37.155.663.951	28 Sekolah	38.068.859.097	29 Sekolah	39.415.441.975	30 Sekolah	41.303.488.861				
			1.01.02.1.01.48	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas	Terlaksananya Penilaian Terhadap Kurikulum Satuan Pendidikan di SMA se Sumatera Barat	1 Kegiatan	295.605.148	1 Kegiatan	299.374.195	1 Kegiatan	306.732.079	1 Kegiatan	317.581.896	1 Kegiatan	332.794.449				
			1.01.02.1.01.53	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Dana BOS SMA Negeri (DAK Non Fisik) di kelola SMA Negeri Se- Sumatera Barat	236 Sekolah	223.346.112.084	236 Sekolah	226.193.836.052	236 Sekolah	231.753.126.103	236 Sekolah	239.950.765.827	236 Sekolah	251.444.694.945				

Tujuan	Sasaran	Kode Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Output) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1.01.02.1.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	<b>APM SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C</b>		<b>236.253.627.334</b>		<b>239.265.925.648</b>		<b>245.146.495.620</b>		<b>253.817.889.549</b>		<b>265.976.070.504</b>				
		1.01.02.1.02.02	Penambahan Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Baru SMK yang dibangun	3 Kegiatan	2.115.316.952	3 Kegiatan	2.142.287.821	3 Kegiatan	2.194.940.005	3 Kegiatan	2.272.580.068	3 Kegiatan	2.381.439.376				
		1.01.02.1.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Terbangunnya Fasilitas Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	6 Kegiatan	936.543.078	6 Kegiatan	948.484.258	6 Kegiatan	971.795.677	6 Kegiatan	1.006.170.319	6 Kegiatan	1.054.367.083				
		1.01.02.1.02.04	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Terbangunnya Fasilitas Ruang Praktik Siswa	5 Kegiatan	1.198.825.130	5 Kegiatan	1.214.110.478	5 Kegiatan	1.243.950.338	5 Kegiatan	1.287.951.715	5 Kegiatan	1.349.646.145				
		1.01.02.1.02.05	Pembangunan Ruang Laboratorium	Terbangunnya Fasilitas Ruang Laboratorium Komputer	3 sekolah	900.710.085	4 sekolah	912.194.384	5 sekolah	934.613.886	6 sekolah	967.673.324	7 sekolah	1.014.026.035				
		1.01.02.1.02.07	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Terbangunnya Fasilitas Ruang Perpustakaan Sekolah	3 sekolah	610.276.657	4 sekolah	618.057.852	5 sekolah	633.248.199	6 sekolah	655.647.640	7 sekolah	687.053.947				
		1.01.02.1.02.08	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Terbangunnya Fasilitas Ruang serba Guna/Aula	7 Sekolah	1.809.395.832	8 Sekolah	1.832.466.124	9 Sekolah	1.877.503.649	10 Sekolah	1.943.915.260	11 Sekolah	2.037.031.130				
		1.01.02.1.02.10	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terbangunnya Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	69 Sekolah	14.993.796.405	70 Sekolah	15.184.971.407	71 Sekolah	15.558.180.784	72 Sekolah	16.108.509.329	73 Sekolah	16.880.126.222				
		1.01.02.1.02.11	Pembangunan Fasilitas Parkir	Terbangunnya Fasilitas Parkir	5 Sekolah	289.242.543	6 Sekolah	292.930.465	7 Sekolah	300.129.978	8 Sekolah	310.746.263	9 Sekolah	325.631.382				
		1.01.02.1.02.12	Pembangunan Kantin Sekolah	Terbangunnya Fasilitas Kantin Sekolah	6 Sekolah	175.986.324	7 Sekolah	178.230.198	8 Sekolah	182.610.660	9 Sekolah	189.070.017	10 Sekolah	198.126.698				
		1.01.02.1.02.15	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi terhadap bangunan sekolah	3 sekolah	350.217.681	4 sekolah	354.683.052	5 sekolah	363.400.292	6 sekolah	376.254.594	7 sekolah	394.277.639				
		1.01.02.1.02.21	Rehabilitasi Ruang Serba Guna Aula	Terlaksananya rehabilitasi Ruang Serba Guna Aula sebagai Kenyamanan Siswa dalam Proses Belajar	10 sekolah	395.151.317	11 sekolah	400.189.604	12 sekolah	410.025.283	13 sekolah	424.528.818	14 sekolah	444.864.257				
		1.01.02.1.02.23	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehabilitasi sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebagai kenyamanan siswa dalam Proses belajar		1.462.326.057		1.480.971.114		1.517.369.754		1.571.042.603		1.646.297.426				
		1.01.02.1.02.28	Pengadaan Mebel Sekolah	Terperuhnya dan tersedianya Mebeler Kelas untuk siswa dan guru	18 sekolah	882.944.176	19 sekolah	894.201.955	20 sekolah	916.179.248	21 sekolah	948.586.609	22 sekolah	994.025.044				
		1.01.02.1.02.31	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Tersedianya Perlengkapan Peserta Didik	2 Sekolah	88.581.075	3 Sekolah	89.710.508	4 Sekolah	91.915.372	5 Sekolah	95.166.630	6 Sekolah	99.725.225				
		1.01.02.1.02.38	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Tersedianya Fasilitas Sarana dan Prasarana pendidikan SMK	13 Sekolah	77.941.295.233	14 Sekolah	78.935.068.048	15 Sekolah	80.875.098.538	16 Sekolah	83.735.836.305	17 Sekolah	87.746.883.170				
		1.01.02.1.02.40	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Terlaksananya Validasi KTSP Terlaksananya kegiatan muatan Lokal Terlaksananya kegiatan Pendidikan Karakter Terlaksananya kegiatan Pendidikan Al-Quran	4 kegiatan	788.388.928	4 kegiatan	798.441.102	4 kegiatan	818.064.827	4 kegiatan	847.001.657	4 kegiatan	887.574.051				
		1.01.02.1.02.46	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik) di kelola SMA Negeri Se- Sumatera Barat	111 Sekolah	131.314.629.860	111 Sekolah	132.988.927.278	111 Sekolah	136.257.469.132	111 Sekolah	141.077.208.397	111 Sekolah	147.834.975.674				
		1.01.02.1.03	<b>Pengelolaan Pendidikan Khusus</b>	<b>persentase peningkatan pelayanan pendidikan khusus dan layanan khusus</b>		<b>11.524.567.187</b>		<b>11.671.508.568</b>		<b>11.958.365.640</b>		<b>12.381.360.466</b>		<b>12.974.442.464</b>				
		1.01.02.1.03.08	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Rehab Ruang Kelas Terlaksananya Rehab Ruang Bina Wicara Terlaksananya Rehab keterampilan Terlaksananya Rehab Ruang Guru Terlaksananya rehab Toilet Tersedianya Peralatan dan media bagi peserta didik SLB	33 Sekolah	6.278.586.319	34 Sekolah	6.358.640.011	35 Sekolah	6.514.919.796	36 Sekolah	6.745.367.455	37 Sekolah	7.068.478.636				
		1.01.02.1.03.38	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Terperuhnya Perlengkapan Didik Peserta SLB	2 Sekolah	160.844.633	3 Sekolah	162.895.446	4 Sekolah	166.899.016	5 Sekolah	172.802.618	6 Sekolah	181.080.070				
		1.01.02.1.03.47	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Evaluasi dan Validasi Implementasi KTSP SLB	1 kegiatan	185.688.373	1 kegiatan	188.055.950	1 kegiatan	192.677.905	1 kegiatan	199.493.364	1 kegiatan	209.049.335				
		1.01.02.1.03.52	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Dana BOS SLB Negeri (DAK Non Fisik) di kelola SMA Negeri Se- Sumatera Barat	29 Sekolah	4.899.447.862	29 Sekolah	4.961.917.161	29 Sekolah	5.083.868.923	29 Sekolah	5.263.697.029	29 Sekolah	5.515.834.422				

Tujuan	Sasaran	Kode Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		1.01.05	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN</b>	Persentase satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus yang dikendalikan dan diawasi	21	496.040.000	36	502.364.000	51	514.711.000	66	532.918.000	81	558.445.000			Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat
		1.01.05.1.01	<b>Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>			198.416.000		200.945.600		205.884.400		213.167.200		223.378.000				
		1.01.05.1.01.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1 Kegiatan	119.049.600	1 Kegiatan	120.567.360	1 Kegiatan	123.530.640	1 Kegiatan	127.900.320	1 Kegiatan	134.026.800				
		1.01.05.1.01.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1 Kegiatan	79.366.400	1 Kegiatan	80.378.240	1 Kegiatan	82.353.760	1 Kegiatan	85.266.880	1 Kegiatan	89.351.200				
		1.01.05.1.02	<b>Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</b>			297.624.000		301.418.400		308.826.600		319.750.800		335.067.000				
		1.01.05.1.02.01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1 Kegiatan	99.208.000	1 Kegiatan	100.472.800	1 Kegiatan	102.942.200	1 Kegiatan	106.583.600	1 Kegiatan	111.689.000				
		1.01.05.1.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1 Kegiatan	99.208.000	1 Kegiatan	100.472.800	1 Kegiatan	102.942.200	1 Kegiatan	106.583.600	1 Kegiatan	111.689.000				
		1.01.05.1.02.03	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat		1 Kegiatan	99.208.000	1 Kegiatan	100.472.800	1 Kegiatan	102.942.200	1 Kegiatan	106.583.600	1 Kegiatan	111.689.000				
5. Meningkatkan kualitas pembelajaran yang mendukung pemenuhan kompetensi dan karakter siswa	2. Meningkatkan kualitas pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	1.01.02	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>	APK Pendidikan Menengah	93,22		94,7		96,2		97,7		99,2				Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat
				APM Pendidikan Menengah	73,42	5.940.498.550	73,49	6.016.241.530	73,56	6.164.106.000	73,65	6.382.144.570	73,72	6.687.856.940				
				APK SLB	53,8		54,72		55,65		56,57		57,5					
6. Meningkatkan daya saingan lulusan SMK yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri	3. Meningkatkan Relevansi Pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus	1.01.02.1.01	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</b>	APM SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C		3.279.411.292		3.321.224.682		3.402.852.244		3.523.218.934		3.691.985.341				
		1.01.02.1.01.49	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya Pembinaan Minat, bakat dan Kreatifitas Siswa 7 Cabang, KSN, KOSN, FLS2N, Lomba Debat Bahasa / bahasa indonesia, Parade Cinta Tanah Air, Cerdas Cermat TAP MPR, Lomba Mushabqah Tilawatil Quran	7 Kegiatan	3.279.411.292	7 Kegiatan	3.321.224.682	7 Kegiatan	3.402.852.244	7 Kegiatan	3.523.218.934	7 Kegiatan	3.691.985.341				
		1.01.02.1.02	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</b>	APM SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C		1.459.754.878		1.478.367.152		1.514.701.793		1.568.280.270		1.643.402.773				
		1.01.02.1.02.41	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan LKS Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan FLS2N Terlaksananya dan Terpilihnya Pemenang Pada Lomba Kegiatan O2SN Terlaksananya Kegiatan yang meningkatkan kemampuan siswa di bidang sains Terlaksananya kegiatan tahfidz di SMKN 1 Suli kab. Limapuluh Kota Terlaksananya Kegiatan Pemahaman Siswa di bidang NAPZA	6 Kegiatan	1.459.754.878	6 Kegiatan	1.478.367.152	6 Kegiatan	1.514.701.793	6 Kegiatan	1.568.280.270	6 Kegiatan	1.643.402.773				

Tujuan	Sasaran	Kode Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	persentase peningkatan pelayanan pendidikan khusus dan layanan khusus		1.201.332.380		1.216.649.696		1.246.551.964		1.290.645.366		1.352.468.825				
		1.01.02.1.03.48	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Terlaksananya LKS SDLB, SMPB, dan SMALE Terlaksananya dan terpilihnya pemenang lomba FL2SN SLB Tingkat Provinsi dan persiapan Tingkat Nasional Terlaksananya dan terpilihnya pemenang lomba O2SN SLB Tingkat Provinsi dan persiapan Tingkat Nasional	3 kegiatan	1.201.332.380	3 kegiatan	1.216.649.696	3 kegiatan	1.246.551.964	3 kegiatan	1.290.645.366	3 kegiatan	1.352.468.825				
		1.01.06	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Jumlah penerima penghargaan Bahasa dan Sastra Daerah	6	496.040.000	12	502.364.000	18	514.711.000	24	532.918.000	30	558.445.000			Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat
				Jumlah modul dan bahan ajar bahasa daerah yang disusun	3		6		9		12		15					
		1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			496.040.000		502.364.000		514.711.000		532.918.000		558.445.000				
		1.01.06.1.01.04	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastran Daerah Kewenangan Provinsi		1 Kegiatan	99.208.000	1 Kegiatan	100.472.800	1 Kegiatan	102.942.200	1 Kegiatan	106.583.600	1 Kegiatan	111.689.000				
		1.01.06.1.01.06	Peningkatan Apresiasi Siswa terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi		1 Kegiatan	148.812.000	1 Kegiatan	150.709.200	1 Kegiatan	154.413.300	1 Kegiatan	159.875.400	1 Kegiatan	167.533.500				
		1.01.06.1.01.07	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi		1 Kegiatan	248.020.000	1 Kegiatan	251.182.000	1 Kegiatan	257.355.500	1 Kegiatan	266.459.000	1 Kegiatan	279.222.500				
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Jumlah Kurikulum Muatan Lokal yang dikembangkan	33	317.382.000	39	321.428.000	45	329.328.000	51	340.977.000	57	357.311.000			Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat
		1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Persentase peningkatan pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya bagi peserta didik		317.382.000		321.428.000		329.328.000		340.977.000		357.311.000				
		1.01.03.1.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Tersedianya Kurikulum Muatan Lokal Mata Pelajaran Budaya Alam Minang Kabau (BAM)	1 Kegiatan	317.382.000	1 Kegiatan	321.428.000	1 Kegiatan	329.328.000	1 Kegiatan	340.977.000	1 Kegiatan	357.311.000				
7. Meningkatkan Kuantitas, Kualitas dan distribusi guru dan tenaga kependidikan	4. Meningkatkan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pendidik	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK Pendidikan Menengah	93,22		94,7		96,2		97,7		99,2				Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Sumatera Barat
				APM Pendidikan Menengah	73,42	11.880.997.100	73,49	12.032.483.060	73,56	12.328.212.000	73,65	12.764.289.140	73,72	13.375.713.880				
				APK SLB	53,8		54,72		55,65		56,57		57,5					
		1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	APM SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C		5.237.481.697		5.304.261.019		5.434.626.754		5.626.861.969		5.896.395.398				
		1.01.02.1.01.47	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses belajar mengajar di kota Padang	17 Sekolah	5.237.481.697	17 Sekolah	5.304.261.019	17 Sekolah	5.434.626.754	17 Sekolah	5.626.861.969	17 Sekolah	5.896.395.398				
		1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	APM SMA/SMK/MA/ SMALB Paket C		6.303.905.715		6.384.282.235		6.541.192.244		6.772.569.219		7.096.983.398				
		1.01.02.1.02.39	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses belajar mengajar di kota Padang	12 Sekolah	5.756.037.752	12 Sekolah	5.829.428.806	12 Sekolah	5.972.701.877	12 Sekolah	6.183.970.045	12 Sekolah	6.480.189.617				
		1.01.02.1.02.45	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Bimtek Pembentukan LSP P1 Terlaksananya SMK dan SLB Terlaksana kegiatan Rakor Kemitraan Terlaksananya Verifikasi TUK	2 Kegiatan	547.867.963	2 Kegiatan	554.853.429	2 Kegiatan	568.490.366	2 Kegiatan	588.599.175	2 Kegiatan	616.793.780				
		1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus	persentase peningkatan pelayanan pendidikan khusus dan layanan khusus		339.609.689		343.939.805		352.393.003		364.857.951		382.335.084				
		1.01.02.1.03.46	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terlaksananya Proses belajar mengajar di kota Padang	2 Sekolah	339.609.689	2 Sekolah	343.939.805	2 Sekolah	352.393.003	2 Sekolah	364.857.951	2 Sekolah	382.335.084				

Tujuan	Sasaran	Kode Kegiatan	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.		
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Peresentase pendidik dan tenaga kependidikan yang dipetakan	71,07	527.009.000	74,07	533.729.000	77,07	546.847.000	80	566.190.000	83,02	593.311.000			Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat	Sumatea Barat
		1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi				533.729.000		546.847.000				566.190.000					
		1.01.04.1.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya teraksananya pemantauan dan Pengelolaan Tunjangan Guru dan Pengawas Terlaksananya Pemetaan Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlaksananya Penguatan Pengawas SMA, SMK dan SLB Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Guru	4 Kegiatan	205.149.269	4 Kegiatan	207.765.170	4 Kegiatan	212.871.625	4 Kegiatan	220.401.292	4 Kegiatan	230.958.709				
		1.01.04.1.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Bimbingan Teknis Informasi dan Teknologi Bagi Guru SMA, SMK dan SLB Terlaksananya Lomba Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Berprestasi Tingkat SMA, SMK, dan SLB tahun 2021 Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Guru Berdasarkan Jenis Ketunaan (Tunagrahita dan Autis) Terlaksananya Peningkatan Komptensi Guru Teknologi Kejuruan Terlaksananya Seleksi Calon Kepala SMA, SMK, SLB dan Pengawas Sekolah Terlaksananya Training Of Trainer Musyawarah Guru Mata Pelajaran (TOT MGMP) SMA, SMK dan Kelompok Kerja	6 Kegiatan	321.859.731	6 Kegiatan	325.963.830	6 Kegiatan	333.975.375	6 Kegiatan	345.788.708	6 Kegiatan	362.352.291				

**BAB VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PENDIDIKAN**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam urusan pendidikan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir periode masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2024 meskipun periodeisasi RPJMD Tahap IV dari RPJPD 2005-2025 adalah Tahun 2021-2026.

Adapun Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Urusan Pendidikan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Harapan Lama Sekolah	%	14,04	14,05	14,06	14,08	14,09	14,10	14,10
2.	Rata-rata Lama Sekolah	%	9,09	9,18	9,28	9,38	9,47	9,57	9,57
3.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16 - 18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	73,13	73,42	73,49	73,56	73,65	73,72	73,72
4.	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 4 - 18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	52,87	53,80	54,72	55,65	56,57	57,50	57,50
5.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%	91,70	93,22	94,70	96,20	97,70	99,20	99,20

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pendidikan Menengah								
6.	Persentase SMA Negeri terakreditasi	%	85,45	87,46	89,47	91,48	93,49	95,50	95,50
7.	Persentase SMK Negeri terakreditasi	%	83,33	85,02	86,70	88,38	90,07	91,75	91,75
8.	Persentase SLB Negeri terakreditasi	%	51,72	53,38	55,03	56,69	58,34	60,00	60,00
9.	Persentase siswa dengan nilai kompetensi literasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	N/A	58,2	58,51	58,82	59,13	59,45	59,45
10.	Persentase Siswa dengan nilai kompetensi numerasi yang memenuhi kompetensi minimum	%	N/A	27,4	27,70	28,01	28,32	28,63	28,63
11.	Rasio guru terhadap murid pada SMA	%	13,53	14,04	14,54	15,05	15,55	16,06	16,06
12.	Rasio guru terhadap murid pada SMK	%	12,2	12,57	12,95	13,32	13,69	14,07	14,07
13.	Rasio guru terhadap murid pada SLB	%	5,04	5,27	5,49	5,72	5,95	6,17	6,17
14.	Jumlah SMK yang terevitalisasi	Unit	N/A	3	6	9	12	16	16
15.	Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri	%	45	50	55	56	60	65	65
16.	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam satu tahun setelah lulus sekolah	%	30	31,5	32	34	35	40	40
17.	Persentase lulusan pendidikan	%	35	37	37,5	38	39	40	40

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	menengah yang melanjutkan pada pendidikan tinggi								
18.	Persentase lulusan pendidikan SMA yang diterima pada Perguruan Tinggi Negeri	%	47,21	49,33	52,17	53,40	55,22	56	56
19.	Persentase Kualifikasi guru SMA pendidikan minimal S1/D4	%	99,06	99,30	99,53	99,77	99,91	100	100
20.	Persentase Kualifikasi guru SMK pendidikan minimal S1/D4	%	98,79	99,03	99,28	99,51	99,77	100	100
21.	Persentase Guru Kejuruan SMK yang mempunyai pengalaman kerja di Industri	%	45	50	55	56	60	65	65
22.	Persentase Kualifikasi guru SLB pendidikan minimal S1/D4	%	92,20	93,76	95,32	96,88	98,44	100	100
23.	Persentase Guru SMA yang bersertifikasi	%	74,66	79,73	84,80	89,86	94,93	100	100
24.	Persentase Guru SMK yang bersertifikasi	%	74,97	79,97	84,99	89,98	95,00	100	100
25.	Persentase Guru SLB yang bersertifikasi	%	71,06	76,85	82,64	88,42	94,21	100	100
26.	Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan SMA pendidikan minimal S1/D4	%	75,73	80,60	85,47	90,26	95,13	100	100
27.	Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan SMK pendidikan minimal S1/D4	%	73,49	78,76	84,03	89,46	94,73	100	100

No	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Tiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
28.	Persentase Kualifikasi Tenaga Kependidikan SLB pendidikan minimal S1/D4	%	86,00	88,00	92,00	94,00	98,00	100	100

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pendidikan Tahun 2021-2026 ini disusun sebagai penjabaran dari Rencana jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 di Bidang Urusan Pendidikan. Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat ini merupakan dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan permasalahan yang ada atau mungkin timbul. Dengan adanya dokumen ini, diharapkan ada kesatuan langkah dan sinergitas di antara para pemangku kepentingan dalam rangka memajukan dunia pendidikan melalui pelayanan pendidikan yang terencana, terarah, dan terpadu sehingga akan terwujud suatu hasil pembangunan dalam bidang pendidikan yang diinginkan.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan, telah terpetakan dalam dokumen ini. Diperlukan konsistensi, komitmen, dan kerjasama yang kuat dari UPTD, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I-VIII, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Satuan Pendidikan maupun pihak terkait, agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan bisa dilaksanakan secara lebih efektif dan berdaya guna serta dapat mendorong dalam meningkatkan pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. Dengan mempertimbangan hal tersebut, maka visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat yang dikembangkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”**. Berdasarkan visi tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat termasuk kedalam Misi Ke-1 yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing”**.

Karena itu, renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan RKA Dinas Pendidikan serta digunakan sebagai

bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Sumatera Barat. Harus diperhatikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target penyelenggaraan bidang pendidikan serta mendukung Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Pengendalian dan evaluasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKIP) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Laporan Kinerja (LKIP) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dimasa yang akan datang.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan mutu pendidikan masyarakat.